



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu – isu Strategis	4
1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana – Prasarana dan Anggaran.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	35
1.5 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024.....	35
1.6 Langkah Perbaikan Internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.....	35
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 36
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan	36
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	37
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	42
2.4 Perjanjian Kinerja.....	49
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	63
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 67
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	67
3.2 Realisasi Anggaran	111
3.3 Inovasi.....	121
3.4 Penghargaan	122
 BAB IV PENUTUP	 123
4.1 Kesimpulan.....	123
4.2 Rekomendasi	124
4.3 Hal – Hal Yang Dicapai Di Tahun Mendatang	127
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja 2025 dan 2026	
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025, 2026 dan 2027	
Matrik Capaian Kinerja OPD (Tahun 2025-2029) yang terkait dengan Renstra OPD	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1	Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pangkat/golongan ruang dan jabatan serta Jenis Kelamin s/d Bulan Desember 2025	6
Tabel 1. 2	Sarana dan Prasarana Penunjang Tahun 2025	33
Tabel 1. 3	Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	35
Tabel 2. 1	Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021-2026	36
Tabel 2. 2	Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025-2029	37
Tabel 2.2. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2025	38
Tabel 2.2. 2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan	39
Tabel 2.3. 1	Struktur Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	46
Tabel 2.4. 1	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 2.4. 2	Program Dan Kegiatan Tahun 2025	50
Tabel 2.4. 3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	56
Tabel 2.4. 4	Program Dan Kegiatan Tahun 2025	57
Tabel 2.5. 1	Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	64
Tabel 3.1. 1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan (Rencana Strategis 2025-2029)	69
Tabel 3.1. 2	Capaian Kinerja Organisasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	70
Tabel 3.1. 3	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	72
Tabel 3.1. 4	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023	75
Tabel 3.1. 5	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah	79
Tabel 3.1. 6	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/regional	81
Tabel 3.1. 7	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan	82
Tabel 3.1. 8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan	92

Tabel 3.1. 9 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.....	94
Tabel 3.2. 1 Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	112
Tabel 3.2. 2 Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	117
Tabel 3.4. 1 Prestasi Urusan Pemerintahan Umum (Sekretariat Dprd) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	122

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Dprd Kabupaten Pekalongan	18
Gambar 2.5. 1 Website Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65
Gambar 2.5. 2 JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor: Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah (IKU-OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2025 – 2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kajen, 31 Januari 2026
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP
NIP.19791204 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kab/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang pemerintahan umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bisnis proses) dan sumber daya manusia aparatur. Mendukung hal tersebut, akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas

perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Sehubungan hal dimaksud, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memegang prinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit kerja pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan sumber daya yang digunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggung-jawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang dicapai secara jujur, obyektif, akurat dan transparan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LKjIP juga berfungsi untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan perlu penataan organisasi pemerintahan yang baik yaitu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan dengan mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif, profesional, berkarakter, akuntabel dan dengan dukungan sistem mekanisme kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, diyakini mampu mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang baik. Sejalan dengan RPJM Nasional yang pada nilainya menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat dengan lebih produktif, profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Guna mewujudkan pencapaian target-target kinerja pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, adapun tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas

Sasaran : 1. Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Laporan kinerja disusun sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penyajian pelaporan kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja, tingkat capaian tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan

peningkatan pencapaian kinerja yang merupakan gambaran kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2025

1.2 Isu – isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak bagi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Sebagaimana diuraikan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029 dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, terdapat 6 (Enam) isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang berkompeten dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD
3. Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu
5. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan rapat
6. Rencana kerja tahunan DPRD belum dilaksanakan secara optimal

1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana – Prasarana dan Anggaran

a. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Aparatur Sipil

Negara (ASN), PPPK dan out sourcing, sampai dengan bulan Desember 2025 berjumlah 71 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1) Sekretaris DPRD	: 1 orang
2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	: 1 orang
-Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang-undangan	: 3 orang
-Sub Koordinator Bagian Persidangan dan Risalah	: 4 orang
-Sub Koordinator Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi	: 6 orang
3) Bagian Program dan Keuangan	: 1 orang
-Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran	: 1 orang
-Sub Koordinator Verifikasi	: 2 orang
-Sub Koordinator akuntansi dan pelaporan	: 5 orang
4) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	: 1 orang
-Sub Koordinator Fasilitas penganggaran	: 2 orang
-Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan	: 3 orang
-Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi	: 2 orang
5) Bagian Umum	: 1 orang
-Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	: 4 orang
-Sub Bagian Rumah Tangga	: 3 orang
-Sub Bagian Perlengkapan	: 3 orang
6) Out sourcing	: 28 orang

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan berdasarkan pangkat/golongan ruang dan jabatan serta jenis kelamin sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten
Pekalongan Berdasarkan Pangkat/golongan ruang dan jabatan serta
Jenis Kelamin s/d Bulan Desember 2025

No	JABATAN	PNS Golongan (orang)								PPPK Golongan (orang)		Total (orang)
		IV		III		II		I		IX		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-			1
2	Kepala Bagian	3	1	-	-	-	-	-	-			4
3	Kepala Sub Bagian	-	-		2	-	-	-	-			2
4	Perancang Peraturan Per UU	1	-	-	-	-	-	-	-			1
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1	1	3	-	-	-	-		1	6
6	Perisalah legeslatif Ahli Muda	-	-	1	-	-	-	-	-			1
7	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	-	-	-	1	-	-	-	-	1		2
8	Penelaah Tekhnis Kebijakan	-	-	7	5	-	-	-	-			12
9	Pengadministrasian Pekantoran	-	-	2	1	-	1	-	-			4
10	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	-	-	1	3	-	-	-	-			4
11	Pengolah Data dan Informasi	-	-	3	-	-	-	-	-			3
12	Penata Layanan Operasional	-	-	1	-	-	-	-	-			1
13	Tekhnisi Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	2	-	-	-			2
Jumlah (orang)		5	2	16	15	2	1	0	0	1	1	43
Persentase (%)		12	5	37	35	5	2	0	0	2	2	100

b. Kedudukan dan Tupoksi Sekretariat DPRD

1. Kedudukan Sekretariat DPRD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menentukan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga memerintahkan agar organisasi Sekretariat DPRD harus disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan. Perkembangan ini didasarkan pada pemikiran ketika system pemerintahan menempatkan posisi lembaga legislatif sejajar dengan Eksekutif sehingga peran dan tanggungjawab Sekretariat DPRD menjadi semakin penting, dengan penataan SOT yang baru diharapkan kualitas staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan meningkat, tuntutan peningkatan peran dan tanggungjawab Sekretariat DPRD Perlu dukungan dari semua pihak sehingga Sekretariat DPRD mampu mengikuti perkembangan zaman serta dapat merealisasikan

pelayanan prima dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD.

Kedudukan Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, merupakan unsur aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD;
- b. Pengoordinasian Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi Sekretariat DPRD; dan

- c. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

Untuk itu struktur organisasi yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dijabarkan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bagian Program dan Keuangan;
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
- e. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Perlengkapan.
- 1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi:

- 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- 3. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD
- 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahliyang diperlukan oleh DPRD
- 2) Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, dan memfasilitasi tugas dan fungsi legislasi serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kajian peraturan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- g. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- h. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft Raperda inisiatif;

- i. Memverifikasi, mengevaluasi naskah akademik dan Raperda Inisiatif, dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yang terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah; dan
- c. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud diatas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan.

3) Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan perencanaan, penganggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD
- d. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

- g. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Bagian Program dan Keuangan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator yang terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Verifikasi; dan
- c. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Program dan Keuangan.

4) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;

- c. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran;
- b. Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan; dan
- c. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

5) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian, serta rumah tangga dan perlengkapan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- e. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- f. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas fungsinya.

Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Masing-masing Subbagian mempunyai tugas yaitu:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata kelola administrasi Sekretariat DPRD, tata kelola kepegawaian Sekretariat DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD. Sedangkan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- c) Melaksanakan kearsipan;
- d) Menyusun administrasi kepegawaian;
- e) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- g) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- h) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- i) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Administrasi Keanggotaan DPRD; dan
- j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Rumah Tangga sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengatur tatakelola rumah tangga Sekretariat DPRD. Tugas subbagian Rumah Tangga meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Rumah Tangga;
- b) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor, halaman dan taman kompleks Sekretariat DPRD;
- c) Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- d) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- e) Menyiapkan tempat dan atau ruangan akomodasi dan fasilitas untuk rapat upacara pertemuan dinas maupun penerimaan tamu;
- f) Menyediakan cinderamata atau pelakat dan karangan bunga atau bentuk lainnya;
- g) Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga DPRD, Sekretariat DPRD dan rumah dinas Pimpinan DPRD;
- h) Melakukan pengoperasian peralatan teknik penunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- i) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

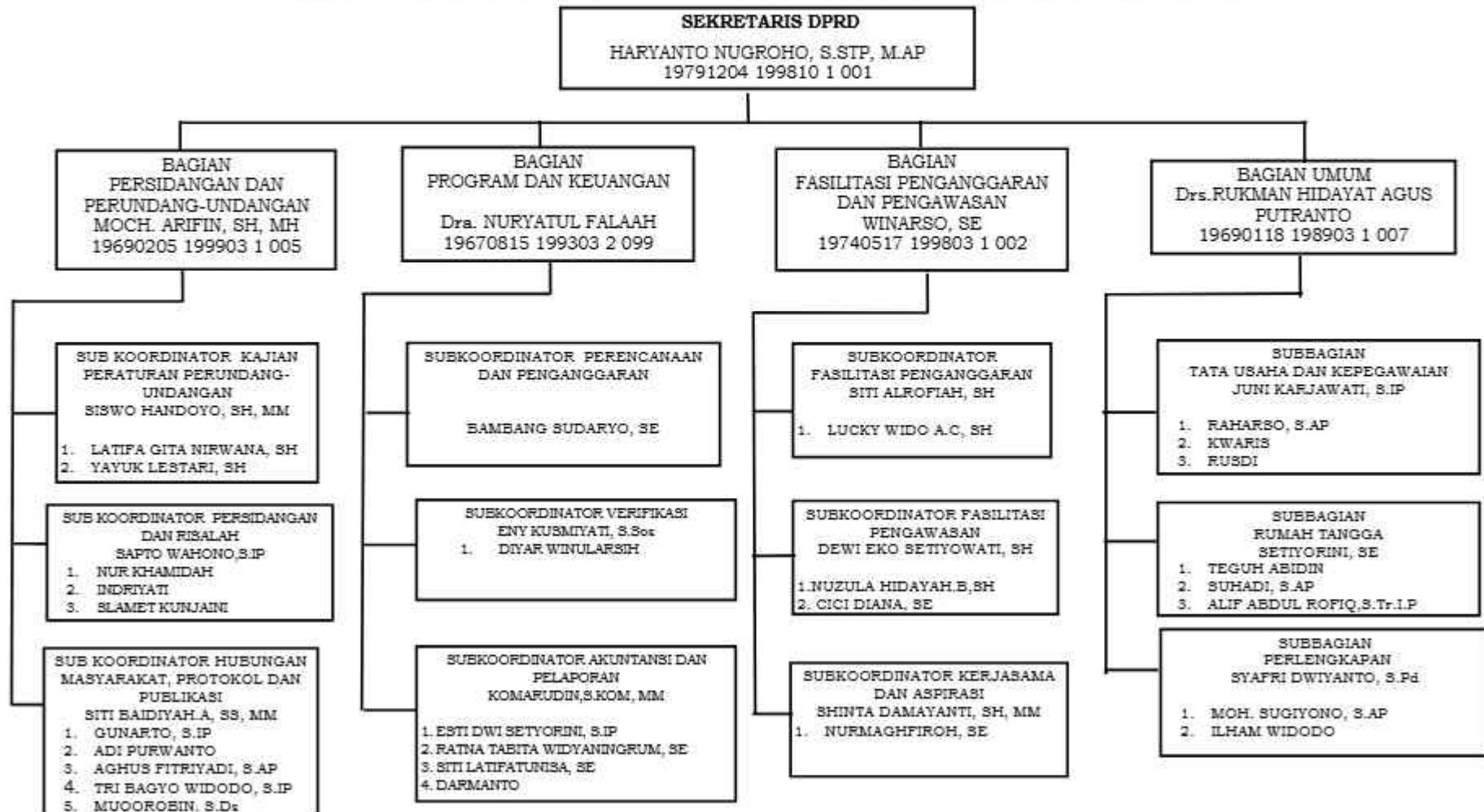
3. Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan sekretariat DPRD. Tugas Subbagian Perlengkapan meliputi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Perlengkapan;

- b) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- c) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- d) Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- e) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- g) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- i) Menyiapkan BBM untuk Pimpinan DPRD dan operasional Sekretariat DPRD;
- j) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perlengkapan; dan
- k) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 1. 1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN



3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 154 ayat (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu lembaga Perwakilan Rakyat maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengemban tugas dan fungsi yang penting, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Oleh sebab itu perlu adanya kontrol terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pengelolaan organisasi pelaksanaan sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena merupakan bagian mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Bidang Legislasi, Bidang Penganggaran, Bidang Pengawasan. Peran dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semakin penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang tergambar dari tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bidang Legislasi misalnya terjadi pergeseran kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah). DPRD diberi kekuasaan membentuk Peraturan Daerah sedangkan pihak Eksekutif direduksi menjadi hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Konsekuensi perubahan konstitusi tersebut adalah peningkatan peran DPRD baik secara lembaga/peran kolektif maupun secara individual.

Dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan dibentuk alat kelengkapan dewan dan didalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan DPRD tersebut dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Alat kelengkapan DPRD mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usulan masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam keputusan DPRD.

Dalam hal terjadinya penggantian Anggota alat kelengkapan DPRD akan ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

(1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD dan berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dan penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Wakil Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.

Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/181 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024, sehingga susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. H. Abdul Munir
- Wakil Ketua : Ruben R Prabu Faza
- Wakil Ketua : H. Sumar Rosul, S.IP, M.Ap
- Wakil Ketua : Ahmad Ridhowi

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRD di pengadilan;

- h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Komisi

Komisi dibentuk dengan ketentuan DPRD yang beranggotakan dari masing-masing fraksi, komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-Komisi didasarkan atas usulan Fraksinya.

Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu Komisi dan jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kab. Pekalongan dengan Surat Keputusan DPRD Kab. Pekalongan Nomor 27 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Dengan susunannya sebagai berikut :

(a) Komisi A dengan susunan keanggotaan :

Ketua	: H. Kholis Jazuli
Wakil ketua	: Mukhamad Rif'an
Sekretaris	: Ahmad Muzaki, SM
Anggota	: 1. H. Saeful Bahri, S.Ag
	2. Jahirin, MH
	3. Drs. H. M. Mochtar, MM
	4. Muhammad Sabiq Ashraf, SH

5. Dinda Aniva Nutkhi, SH
 6. Dodiek Prasetyo, S.Pd
 7. Juharno, SH
- (b) Komisi B dengan susunan keanggotaan :
- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| Ketua | : Eko Arifiyanto, SH |
| Wakil Ketua | : As'adillah |
| Sekretaris | : Rokhyasin, SE |
| Anggota | : 1. Nashih Syarifudin, S.K.M, M.A.P |
| | 2. H. Afandi |
| | 3. Sabdo, SH |
| | 4. Eko Pamuji, SH |
| | 5. Rossi Ardiyanti, ST, M.Kes |
| | 6. Patmisari, Amd |
| | 7. H. Mirza Kholik |
- (c) Komisi C dengan susunan keanggotaan :
- | | |
|-------------|---------------------------------|
| Ketua | : H. Achmad Kozin, ST |
| Wakil Ketua | : Catur Andriansah, S.Pd |
| Sekretaris | : H. Edy Haryanto, SE |
| Anggota | : 1. H. Budi Santoso, SH |
| | 2. H. Masbukhin, S.Ag |
| | 3. Rizal Efendi |
| | 4. M. Widiyanto, S.Pd |
| | 5. Ian Kurnuiawan, ST, M.AP |
| | 6. Haryanto |
| | 7. Nanang Purwidiyanto |
| | 8. Moh. Wyldanyl Firdaus, S.Ked |
- (d) Komisi D dengan susunan keanggotaan :
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| Ketua | : M. Haqqi Hasenda |
| Wakil Ketua | : H. Mashadi, SH, M.A |
| Sekretaris | : Taufiq Rizal, SE |
| Anggota | : 1. Dra. Hj. Hindun, M.H |
| | 2. Hj. Fatkhiana Dewi, SH |
| | 3. Laila Nur Azizah |
| | 4. Slamet Nurudin, SE, M.AP |

5. Umi Farida

6. Shelva Ria Paparingga, M.Pd

7. H. Syihabuddin Nur S.H.I

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;.

(3) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Susunan keanggotaan Badan musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD, Wakil setiap Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap komisi.

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya menjadi Ketua dan Wakil Badan Musyawarah merangkap anggota sedangkan Sekretaris DPRD karena jabatannya menjadi Sekretaris bukan Anggota.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan dengan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan masa keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan Susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Drs. H. Abdul Munir
- (b) Wakil Ketua :
 - H. Ruben R Prabu Faza
 - H. Sumar Rosul, S.IP, M. Ap
 - Ahmad Ridhowi
 - Saeful Bahri, S.Ag
 - H. Masbukhin, S.Ag
 - H. Afandi
 - H. Edi Haryanto, SE
 - M. HAqi Hasenda
 - As'adillah
 - Muhammad Sabiq Ashraff, SH
 - Rokhyasin, SE
 - Laila Nur Azizah
 - M. Widiyanto, S.Pd
 - Ian Kurniawan, ST, M.Ap
 - Taufiq Rizal, SE
 - Dodiek Prasetyo, S.Pd

- Ahmad Muzaki, SM
- Juharno, SH
- Shelva Ria Paparingga, Mpd
- Mukhamad Rif'an
- Moh. Wyldanyl Firdaus, S.Ked

(c) Sekretaris bukan Anggota : Haryanto Nugroho, S.STP, M.AP

Adapun tugas Badan Musyawarah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD diminta maupun tidak diminta.
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal Acara Rapat Paripurna.
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. memberikan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan
- e. merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus.

(4) Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Badan Anggaran terdiri dari Pimpinan, Wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotannya dan seorang wakil dari setiap komisi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap Anggota.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 28 tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pekalongan masa keanggotaan 2024-2029 ,
dengan susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Drs. H. Abdul Munir
- (b) Wakil Ketua : - H. Ruben R Prabu Faza
- H. Sumar Rosul, S.IP, M.AP
- Ahmad Ridhowi
- (c) Anggota : - Dra. Hj. Hindun, MH
- H. Kholis Jazuli
- Hj. Fatkhiana Dewi, SH
- H. Budi Santosa, SH
- Jahirin, MH
- Nashih Syarifuddin, S.K.M, M.A.P
- H. Achmad Kozin, ST
- Drs. H. M. Mochtar
- Rizal Efendi
- H. Mashadi, SH, M.A
- Eko Arifiyanto, S.H
- Rossi Ardiyanti, S.T, M.Kes
- Haryanto
- Ahmad Muzaki, SM
- Catur Andriansah, S.Pd
- Patmisari, Am.d
- H. Mirza Kholik
- H. Syihabudin Nur, S.H.I

(d) Sekretaris bukan Anggota : Haryanto Nugroho, S.STP, M.AP

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka

- pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.
- (5) Badan Kehormatan Dewan

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk berdasarkan Peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan pada pasal 91 disebutkan Ayat (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan, Ayat (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dan ayat (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa

keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan kehormatan DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Surat keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 21 tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan masa keanggotaan 2024-2029, dengan susunan sebagai berikut :

- (a) Ketua : Dra. Hj. Hindun, M.H
- (b) Wakil Ketua : Rokhyasin, SE
- (c) Anggota : - Slamet Nurudin, SE, M.AP
- Nanang Purwidiyanto
- Juharno, SH

Badan kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (6) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi, paling banyak 11 (sebelas) orang yang diusulkan masing-masing Fraksi.

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan pasal 83, disebutkan Ayat (3) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda dan Ayat (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda bukan anggota.

Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 tertanggal 24 September 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan masa keanggotaan 2024-2029, dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| (a) Ketua | : Nashih Syarifudin, S.KM, M.AP |
| (b) Wakil Ketua | : Dodiek Prasetyo, S.Pd |
| (c) Anggota | : - Sabdo, SH |
| | - Muhammad Sabiq Ahsraff, SH |
| | - M. Widiyanto, S.Pd |
| | - Eko Pamuji, SH |
| | - Ian Kurniawan, ST |
| | - Umi Farida |
| | - Shellva Ria Paparingga, M.Pd |
| | - H. Syihabuddin Nur, S.H.I |

- (d) Sekretaris bukan Anggota : Haryanto Nugroho, S.STP, M.AP
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bertugas :
- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar unit rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda; membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(7) Pansus

Panitia khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Panitia khusus dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

Panitia khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota DPRD termasuk seorang Ketua, seorang wakil Ketua, Seorang Sekretaris yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan keanggotaan Panitia Khusus diusulkan oleh Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota Fraksi.

Panitia khusus dapat menunjuk seorang anggotanya sebagai pelapor, Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Khusus bukan anggota.

Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/asset yang dimiliki terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tercantum pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Sarana dan Prasarana Penunjang Tahun 2025

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	Peralatan dan mesin	1064	1064	-	-
A	Kendaraan dinas bermotor perorangan	1	1	-	-
B	Kendaraan dinas bermotor jabatan	5	5		
C	Kendaraan bermotor penumpang	2	2	-	-
D	Kendaraan bermotor beroda dua	8	8	-	-
E	Kendaraan bermotor beroda tiga	1	1	-	-
F	Alat penyimpan hasil percobaan pertanian	4	4	-	-
G	Alat penyimpan perlengkapan kantor	88	88	-	-
H	Alat kantor lainnya	64	64	-	-
I	Meubelair	361	361	-	-
J	Alat pembersih	4	4	-	-
K	Alat pendingin	72	72	-	-
L	Alat dapur	14	14	-	-
M	Alat rumah tangga lainnya (home use)	128	128	-	-
N	Alat pemadam kebakaran	5	5	-	-
O	Meja kerja pejabat	11	11	-	-
P	Meja rapat pejabat	10	10	-	-
Q	Kursi kerja pejabat	23	23	-	-
R	Lemari dan arsip pejabat	9	9	-	-
S	Peralatan studio audio	61	61	-	-
T	Peralatan studio video dan film	14	14	-	-
U	Alat komunikasi telephone	16	16	-	-
V	Alat kedokteran umum				
W	Alat laboratorium lain	31	31	-	-

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
X	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : pkn	44	44	-	-
Y	Komputer jaringan	2	2	-	-
Z	Personal computer	101	101	-	-
Aa	Peralatan personal komputer	49	49	-	-
2	Bangunan gedung	11	11	-	-
3	Jalan, irigasi dan jaringan	4	4	-	-
4	Aset tetap lainnya	4	4	-	-

c. Dukungan Anggaran

Pada Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan terdapat anggaran sebesar Rp. 65,947,529,614,- dengan melaksanakan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 49 (empat puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan anggaran ini menjadi faktor penting dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, sekaligus memperkuat peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai perangkat daerah yang berorientasi pada hasil dan capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

1. Daftar Isi
2. Daftar Tabel
3. Daftar Gambar
4. Kata Pengantar
5. Bab I Pendahuluan
6. Bab II Perencanaan Kinerja
7. Bab III Akuntabilitas Kinerja
8. Bab IV Penutup
- Lampiran – lampiran

1.5 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Tabel 1. 3
Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Memperbaiki perencanaan kinerja periode Renstra Tahun 2026-2029 dengan melakukan perumusan IKU yang memenuhi indikator kinerja SMART dan menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai	Telah memperbaiki perencanaan kinerja periode Renstra Tahun 2025-2029 dengan melakukan perumusan IKU yang memenuhi indikator kinerja SMART dan menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai
2	Data kinerja yang dikumpulkan agar diperhatikan relevansinya untuk mengukur capaian kinerja setiap sasaran strategis dan sasaran program yang sudah ditetapkan	Data kinerja yang dikumpulkan sudah memperhatikan relevansi untuk mengukur capaian kinerja setiap sasaran strategis dan sasaran program yang sudah ditetapkan
3	Setiap unit/satuan kerja agar diarahkan untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Setiap unit/satuan kerja sudah diarahkan untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
4	Setiap pegawai agar diarahkan untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Setiap pegawai sudah diarahkan untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
5	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan kualitas atas capaian kinerja	Dokumen Laporan Kinerja sudah menginfokan kualitas atas capaian kinerja

1.6 Langkah Perbaikan Internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Rekomendasi/Saran LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Lalu yang belum ditindaklanjuti: NIHIL

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 mengalami perubahan kepemimpinan sebagai hasil Pilkada Serentak pada akhir tahun 2024. Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih memiliki Visi dan Misi baru yang selanjutnya diterjemahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029.

Tahun 2025 ini menjadi masa peralihan/transisi, dimana terdapat perubahan dokumen perencanaan strategis (Renstra) berdasarkan RPJMD yang baru sehingga dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025. Adapun tabel tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021-2026

1. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong
2. Misi : Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
3. Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat		Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	91	91	92	93	94
2		Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatn DPRD	91	91	92	93	94

Tabel 2. 2
Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025-2029

1. Visi : Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera
2. Misi : Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani
3. Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	65	66	67	68	69
2		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	100	100	100	100	100
3		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72.45	72.46	72.47	72.48	72.49

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang harus diwujudkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Target Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun
					2025
1	2	3	4	5	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	%	65
2		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	%	100
3		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,45

Tabel 2.2. 2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD		1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD dengan memberdayakan aparatur yang tersedia	1) Meningkatkan penyerapan dan penghimpunan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan kunjungan kerja dalam daerah untuk mengetahui aspirasi masyarakat sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat, Reses yang berguna bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kepada masyarakat.
		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2) Peningkatan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat	2) Meningkatkan kualitas produk-produk DPRD sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	3) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah	3) Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat paripurna yang disesuaikan dengan tata tertib dan kode etik DPRD
			4) Peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	4) Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada DPRD
			5) Pengoptimalan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD	5) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebagai sarana konsultasi dan studi komparasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta peningkatan Fasilitas Tugas DPRD melalui kegiatan penyusunan laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD untuk evaluasi kinerja DPRD, Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, tugas Pimpinan DPRD dan tugas Panitia

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5
			6) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat.	6) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme DPRD dengan mengikuti Orientasi, Pendalaman Tugas DPRD dan kualitas dan kuantitas media cetak sebagai media informasi untuk mempublikasikan kegiatan DPRD dan kontrol masyarakat terhadap kinerja DPRD
			7) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah	7) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi anggota DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota
			8) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi DPRD	8) Melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik daerah agar tepat guna dan sasaran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			9) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan	9) Meningkatkan rapat-rapat pembahasan kebijakan anggaran seperti pembahasan KUA dan PPAS, APBD, Laporan semester dan pertanggung jawaban APBD agar menghasilkan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
			10) Pemanfaatan teknologi informasi secara on line untuk menginformasikan produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD	10) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan melalui pengawasan penggunaan anggaran oleh Pemerintah daerah dan Pertanggungjawabanya dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			11) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	11) Meningkatkan kualitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor .
			12) Pengoptimalan ketersediaan bahan referensi sebagai acuan bagi anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	12) Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan penataan arsip dinamis pada SKPD

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
1	2	3	4	5
			13) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran program kegiatan sehingga ada sinergitas dalam rangka membantu DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat	13) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai bidang kegiatan sebagai sarana memperoleh masukan dalam bidang terkait
			14) Pengoptimalan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	14) Menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah
			15) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali	15) Melakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mebel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang memadahi baik secara kualitatif maupun kuantitatif
			16) Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pelayanan DPRD kepada masyarakat	16) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang produktivitas kinerja aparatur untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan melakukan , penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan mebel, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
			17) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang mobilitas bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	17) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Sekretariat DPRD dengan mengikuti diklat, bintek dan sosialisasi terkait materi yang menunjang pelaksanaan tugas
			18) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD	18) Meningkatkan tanggung jawab dan motivasi kerja aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas DPRD
			19) Peningkatan disiplin aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPRD	19) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan pelayanan prima

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur, maka Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan menetapkan program organisasi, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi outcome program. Secara garis besar program kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- i) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up
- j) Layanan Administrasi DPRD.
 - Fasilitas Fraksi DPRD
 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 Target capaian indikator kinerja Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar 100%, program ini dilakukan oleh 3 bagian yaitu:
 - a. Bagian Persidangan dan perundang-undangan dengan target 100%
 - b. Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan dengan target 100%
 - c. Bagian Umum dengan target 100% melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD

- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - Pelaksanaan Reses
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- g) Pembahasan Kerjasama daerah
 - Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- h) Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Tabel 2.3. 1
Struktur Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten
Pekalongan Tahun 2025

NO	Program dan Kegiatan
1	2
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Bagian Umum
2	Bagian Program dan Keuangan
3	Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.2	Pengadaan Mebel
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	Program dan Kegiatan
1	2
5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.3	Pemeliharaan Mebel
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
8.3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
9	Layanan Administrasi DPRD
9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD
9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1	Bagian Persidangan dan perundang-undangan
2	Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan
3	Bagian Umum
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah
1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

NO	Program dan Kegiatan
1	2
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS
2.2	Pembahasan APBD
2.3	Pembahasan Laporan Semester
2.4	Pembahasan pertanggung jawaban APBD
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3.1	Pengawasan Penggunaan Anggaran
3.2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.1	Pendalaman Tugas DPRD
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4.4	Penyusunan Program kerja DPRD
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.1	Pelaksanaan Reses
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD
6.2	Pengawasan Kode etik DPRD
7	Pembahasan Kerjasama Daerah
7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah
8	Fasilitasi Tugas DPRD
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
8.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD
8.5	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan yang

tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 seperti pada tabel 2.4.1:

Tabel 2.4. 1
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rata-rata penyelenggaraan pelayanan kesekretariatn DPRD	94	%

Pada Tahun 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 2 (dua) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan yang didukung oleh APBD sejumlah Rp. 68.557.515.900,- (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran, sedangkan rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.4.2:

Tabel 2.4. 2
Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	42,004,512,900
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersedia	100	7,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3,500,000
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	3,500,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	5,261,857,000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	12	4,985,897,000
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	275,960,000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100	50,000,000
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	50,000,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	676,500,000
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	14,000,000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	70,000,000
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	180,000,000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	112,500,000
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	150,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	150,000,000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah	100	1,635,064,900
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	112,000,000
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	125,536,700
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38	825,128,200
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	572,400,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100	1,040,830,000
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	310,000,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	730,830,000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	1,521,500,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	168,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	87,500,000
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	15,000,000
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	70,000,000
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,181,000,000
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	30,908,261,000
1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	45	29,780,147,000
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah yang tersedia	5	700,000,000
1.8.3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang melaksanakan medical check up	45	428,114,000
1.9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	100	903,500,000
1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi Fraksi DPRD	6	3,500,000
1.9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	219	900,000,000
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		94	26,553,003,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	100	168,500,000
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	4	3,500,000
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang diselenggarakan	2	15,000,000
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang tersusun	2	150,000,000
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100	133,000,000
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS yang tersusun	2	33,000,000
2.2.2	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	45,000,000
2.2.3	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	1	25,000,000
2.2.4	Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	1	30,000,000
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	100	201,725,000
2.3.1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	8	150,625,000
2.3.2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	51,100,000
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100	3,896,600,000
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	6	2,884,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah paket kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang terlaksana	12	752,600,000
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah laporan penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD	12	250,000,000
2.4.4	Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	2	10,000,000
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	2,023,678,000
2.5.1	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan reses DPRD	3	2,023,678,000
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100	7,000,000
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	1	3,500,000
2.6.2	Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	1	3,500,000
2.7	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	100	3,500,000
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	2	3,500,000
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD	100	20,119,000,000
2.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		20,105,000,000
		Perjalanan Dinas Luar pulau	2	
		Perjalan Dinas Luar Provinsi	50	
		Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 3 hari	50	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 hari	26	
2.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang tersusun	1	3,500,000
2.8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	3,500,000
2.8.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	1	3,500,000
2.8.5	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	1	3,500,000
				68,557,515,900

Tahun 2025 merupakan periode masa transisi dan adanya perubahan dokumen rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 sehingga dilakukan penyesuaian perjanjian kinerja, adapun perubahan itu memuat tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.4. 3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaen Pekalongan

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3		4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	%	65
1.1	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	%	100
1.2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,45

Pada Tahun 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 2 (Dua) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan yang didukung oleh APBD sejumlah

Rp.65.947.529.614,- (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian Tujuan dan Sasaran, sedangkan rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.4.4:

Tabel 2.4. 4
Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	43,901,411,034
	Bagian Umum	Persentase ketercapaian kegiatan bagian umum	100	9,491,887,590
	Bagian Program dan Keuangan	Persentase ketercapaian kegiatan bagian program dan keuangan	100	34,118,523,444
	Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan	Persentase ketercapaian kegiatan bagian Fasilitas Penganggaran dan pengawasan	100	291,000,000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersedia	100	6,910,000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	3,500,000
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	3,410,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	5,529,223,300
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	43	5,285,897,000
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	243,326,300
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100	50,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	50,000,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	820,916,250
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	14,000,000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	70,000,000
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	330,000,000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	125,000,000
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	182,316,250
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	99,600,000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah	100	3,707,757,400
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	2,034,692,500
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31	125,536,700
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	975,128,200
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	572,400,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100	1,057,471,600
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	349,141,600

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	708,330,000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	1,995,370,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	218,000,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	87,500,000
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	56	15,000,000
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	105,000,000
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1,569,870,000
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	29,429,365,234
1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	45	28,476,574,844
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah yang tersedia	4	661,790,390
1.8.3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang melaksanakan medical check up	45	291,000,000
1.9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	100	1,304,397,250
1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi Fraksi DPRD	6	3,500,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12	1,300,897,250
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100	22,046,118,580
	Bagian Persidangan dan perundang-undangan	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat Paripurna	100	3,172,453,590
	Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	100	669,912,160
	Bagian Umum	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	100	18,203,752,830
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	100	151,578,800
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	4	3,223,800
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang diselenggarakan	2	15,000,000
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang tersusun	2	133,355,000
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100	122,556,160
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS yang tersusun	2	28,228,760
2.2.2	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2	67,922,100
2.2.3	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	2	3,240,000
2.2.4	Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	1	23,165,300
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	100	281,116,800
2.3.1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	9	248,942,500

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2.3.2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah	1	32,174,300
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100	3,735,797,810
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	6	2,753,830,000
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah paket kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang terlaksana	12	731,123,450
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah laporan penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD	6	242,576,860
2.4.4	Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	2	8,267,500
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	2,279,153,620
2.5.1	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan reses DPRD	3	2,279,153,620
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100	12,054,600
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	1	9,341,300
2.6.2	Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2	2,713,300
2.7	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	100	3,340,240
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	2	3,340,240
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD	100	15,460,520,550
2.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		15,449,922,830
		Perjalanan Dinas Luar pulau	2	
		Perjalan Dinas Luar Provinsi	30	
		Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 3 hari	20	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 hari	10	
2.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang tersusun	1	2,650,320
2.8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4	2,922,500
2.8.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	12	2,345,000
2.8.5	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	4	2,679,900
				65,947,529,614

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan Misi : Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani dapat diukur dari Keberhasilan Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan salah satunya bisa dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan selama tahun 2025, hal ini disajikan dalam Tabel 2.5.1, dan bisa dilihat dari publikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pekalongan selama tahun 2025 melalui:

- a. Website DPRD Kabupaten Pekalongan didalamnya memuat kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang terkini dan selalu terupdate, sehingga dari website semua kalangan masyarakat bisa melihat dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung dan mengawasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
- b. Publikasi adalah media untuk menyebarluaskan informasi kinerja DPRD melalui media elektronik maupun cetak kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan liputan-liputan yang dilakukan oleh wartawan media cetak maupun elektronik untuk disebarluaskan secara terbuka keseluruh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka mewujudkan birokrasi yang melayani, bersih dan disiplin.
- c. Untuk menyebarluaskan informasi hukum terkait kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan memiliki aplikasi jaringan data dan informasi hukum yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi dalam rangka memajukan Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.5. 1
Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

N O.	KINERJA DPRD	TAHUN		naik/turun (angka)	Prosentase %
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan daerah yang ditetapkan	12	9	-3	-33%
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30	19	-11	-58%
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	8	7	-1	-14%
4.	Keputusan Badan Anggaran	19	24	5	21%
5.	Keputusan Badan Musyawarah	34	44	10	23%
6.	Keputusan Panitia Khusus	35	44	9	20%
7.	Keputusan Komisi I	96	97	1	1%
8.	Keputusan Komisi II	96	98	2	2%
9.	Keputusan Komisi III	98	97	-1	-1%
10.	Keputusan Komisi IV	104	99	-5	-5%
11.	Keputusan Gabungan Komisi I, II, III, IV	27	46	19	41%
12.	Keputusan Badan Kehormatan	9	9	0	0%
13.	Keputusan Bapemperda	25	14	-11	-79%

Gambar 2.5. 1
Website Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan



Berita Terbaru

Berita terbaru dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.



Gambar 2.5. 2
JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pekalongan dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas, Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi dokumen perencanaan dimana untuk Perjanjian kinerja penetapan tahun 2025 disesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 disesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sehingga ada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. hal itu tidak hanya terjadi perubahan anggaran namun juga perubahan tujuan dan sasaran dan indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja yang akan dicapai Tahun 2025.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, dan perjanjian kinerja (PK) maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Interval Nilai Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100%	Istimewa
2.	≥85 – 100%	Baik
3.	≥60 – 85%	Butuh Perbaikan
4.	≥20 – 60%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. Rata-rata Capaian Kinerja Utama

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2025, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah. Pengukuran Capaian Kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Sebelum melakukan analisa terhadap sasaran strategis yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan berikut uraian capaian kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025:

Tabel 3.1. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan (Rencana Strategis 2025-2029)

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	65	66	102	ISTIMEWA	SETWAN
	Rata-rata		65	66	102		

2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan akan disajikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja baik penetapan maupun Perubahan di Tahun 2025, namun demikian capaian kinerja akan disampaikan secara detail dan mendalam pada capaian perubahan perjanjian kinerja 2025 yang merupakan bagian dari capaian indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian akan disajikan analisa capaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. 2
Capaian Kinerja Organisasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025				
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	94	96	102
	Rata-rata		94	96	102

Dari tabel diatas nampak bahwa capaian kinerja berhasil menunjukkan capaian sebesar 102 % atau tercapai dengan **kategori Istimewa**, capaian kinerja tahun 2025 merupakan capaian akhir dari dokumen perencanaan 2021-2026.

Pada sasaran Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dengan capaian kinerja sebesar 102%. Capaian Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD terealisasi sebesar 96% artinya bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik jika dibandingkan dengan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena capaian Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sudah baik, namun demikian pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang masih tercapai 67% karena ada sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan tidak terlaksana, hal ini DPRD Kabupaten Pekalongan tidak melaksanakan kegiatan kajian peraturan perundang-Undangan, karena adanya efesiensi

anggaran, dan ada Produk hukum yang belum selesai pada tahun 2025 dan diteruskan pada Tahun 2026, sekarang masih dalam proses pembahasan, hal ini karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan produk hukum tersebut.

Dalam menyajikan capaian kinerja organisasi tahun 2025 akan di sajikan uraian dan analisis mendalam berdasarkan perubahan perjanjian kinerja 2025 yang telah ditetapkan. Hal itu selaras dengan pelaksanaan monitoring capaian kinerja RKPD yang telah di input kedalam aplikasi SIMDALEV dilakukan mulai dari tri wulan 2 sampai dengan tri wulan 4 serta sesuai dengan SIPD Kemendagri. Dan capaian kinerja ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan program pembangunan jangka menengah. Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025:

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.1. 3
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	Kategori	Sumber Data
1	2		3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	65	66	102	Istimewa	Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	100	85	85		
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72.45	72.5	100		
	Rata-rata sasaran					93	Baik	Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
	Rata-rata capaian kinerja					96	Baik	Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan tabel capaian dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 (satu) Tujuan dengan 1(satu) indikator, indikator tujuan masuk dalam kategori **Istimewa** dimana capaiannya 102%, begitu pula dengan sasaran dari total 2 (dua) indikator sasaran capaiannya 93% masuk dalam kategori **Baik**, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan rata-rata realisasi capaiannya dikategorikan Baik dengan nilai capaian 96%.

- a. Pada indikator kinerja tujuan Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD tercapai sebesar 102% dengan realisasi sebesar 66% dari target Tahun 2025 sebesar 65%. Berdasarkan Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, Survey kepuasan masyarakat diberikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan yang telah diberikan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, ada sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pekalongan yang telah mengisi kuisioner, Hasil survei kepuasan diperoleh dari perhitungan Formulasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan persepsi 9 unsur pelayanan yaitu:
- a) Persyaratan pelayanan
 - b) Prosedur pelayanan
 - c) Waktu penyelesaian pelayanan
 - d) Biaya pelayanan
 - e) Hasil pelayanan
 - f) Kemampuan petugas
 - g) Sikap petugas
 - h) Sarana prasana pelayanan
 - i) Sarana pengaduan
- b. Pada indikator kinerja sasaran Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu tercapai sebesar 85% dengan realisasi sebesar 85% dari target tahun 2025 sebesar 100%. Tahun 2025 ada 13 Produk hukum yang ditargetkan, tetapi yang terfasilitasi hanya 11 produk hukum, sehingga ada 2 Produk Hukum yang belum selesai pada tahun 2025 dan diteruskan pada Tahun 2026, sekarang masih dalam proses pembahasan, hal ini karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan produk hukum tersebut.

- c. Pada indikator kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD tercapai sebesar 100% dengan realisasi sebesar 72,50 dari target tahun 2025 sebesar 72,45. Pada tahun 2025 realisasi kinerja menggunakan data tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2026 belum dilakukannya evaluasi atas AKIP tahun 2025. Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Pekalongan nomor 700.1.2/8.1/EV.SAKIP/VI/2025 Tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, bahwa nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan diperoleh 72,50, perolehan nilai tersebut termasuk dalam kategori BB dengan interpretasi **Sangat Baik**, terdapat Gambaran bahwa Implementasi SAKIP sudah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (outcome). Hal ini terlihat dari capaian kinerja pada komponen perencanaan kinerja yang berkualitas, pengukuran kinerja yang berjenjang, pelaporan kinerja yang sesuai standar dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)

Tabel 3.1. 4
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025											
1	Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat		Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	95	98	103	93	96	103	94	98	104
1		Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	95	95	100	95.1	91	96	94	96	102

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025											
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD							65	66	102
3		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu							100	85	85
4		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD							72.45	72.5	100

Berdasarkan tabel diatas nampak ada kenaikan capaian tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya.

Perbandingan Indikator Kinerja Pada Penetapan Perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

- Pada indikator kinerja tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2023 dan 2024 yaitu Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD mencapai sebesar 103% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 yang mencapai sebesar 104% berarti mengalami kenaikan sebesar 1%, Secara tren, indikator ini menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten melampaui target setiap tahun. Hal ini menunjukkan Kinerja pelayanan administrasi dan dukungan tugas DPRD terus menunjukkan performa optimal dan konsisten di atas target selama tiga tahun berturut-turut.
- Pada Indikator kinerja sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD Tahun 2024 terjadi penurunan realisasi 91% dan capaian hanya 96%, Tahun 2025 menunjukkan **pemulihan signifikan** dengan realisasi 96% dan capaian 102%, Capaian kinerja tahun 2025 lebih baik dibanding 2023 dan 2024. Setelah penurunan pada 2024, kinerja tahun 2025 berhasil melampaui target dan menunjukkan perbaikan kualitas layanan dukungan DPRD.

Perbandingan Indikator Kinerja Pada Perubahan Perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

Karena indikator berikut baru muncul dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka belum dapat dibandingkan dengan tahun

2023 dan 2024 maka bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja tujuan yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 Realisasi sebesar 66% melebihi target yang hanya sebesar 65% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%, hal ini Menunjukkan tingkat kepuasan publik yang baik terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
- Indikator kinerja sasaran pertama yaitu Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu pada tahun 2025 terealisasi sebesar 85% sedangkan targetnya sebesar 100%, sehingga tidak tercapai, hal ini karena DPRD Kabupaten Pekalongan tidak melaksanakan kegiatan kajian peraturan perundang-Undangan, karena adanya efesiensi anggaran, dan ada Produk hukum yang belum selesai pada tahun 2025 dan diteruskan pada Tahun 2026, sekarang masih dalam proses pembahasan, hal ini karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan produk hukum tersebut.
- Indikator kinerja sasaran kedua yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7,50 dengan target sebesar 7,45 sehingga tercapai 100%, Pada tahun 2025 realisasi kinerja menggunakan data tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2026 belum dilakukannya evaluasi atas AKIP tahun 2025. Hal ini terlihat dari capaian kinerja pada komponen perencanaan kinerja yang berkualitas, pengukuran kinerja yang berjenjang, pelaporan kinerja yang sesuai standar dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mendukung efektifitas dan efesiensi kinerja. Berarti untuk tahun 2025 menunjukkan akuntabilitas kinerja yang terjaga.
- Secara umum, **kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibanding 2024**, terutama

pada indikator kinerja Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

- Tren 3 tahun terakhir menunjukkan **kinerja relatif stabil dan mayoritas melampaui target**.
 - Perlu strategi perbaikan pada indikator fasilitasi produk hukum daerah agar capaian dapat memenuhi target di tahun berikutnya.
 - Akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik menunjukkan arah yang positif.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.1. 5
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	66	69	96
2		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	85	100	85
3		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72.5	72.49	100
	Rata-rata			75	80	94

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra rata-rata capaian sudah menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 94%.

- Pada Indikator Kinerja tujuan yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir menunjukkan Tingkat kemajuan sebesar 96%, Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra Indikator ini capaiannya sudah mendekati dengan selisih 3%, tetapi Masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencapai target akhir periode Renstra.
- Pada Indikator kinerja sasaran pertama yaitu Persentase Produk Hukum Daerah yang Difasilitasi Tepat Waktu pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra menunjukkan Tingkat kemajuan baru mencapai 85%, hal ini terdapat selisih kekurangan capaian sebesar 15%, Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra Indikator ini masih memerlukan perhatian serius karena capaian relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Perlu penguatan koordinasi, perencanaan legislasi, serta monitoring proses fasilitasi produk hukum.
- Pada Indikator kinerja sasaran kedua yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100%, Berdasarkan tabel diatas Perbandingan kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra Indikator akuntabilitas kinerja telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target jangka menengah. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja sudah berjalan baik, tetapi masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target nilai SAKIP yang lebih tinggi.

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional/regional

Tabel 3.1. 6
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/regional

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Capaian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat		Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	98	101.87	96
2		Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	96	102.49	94

- Pada Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi dan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD jika dibandingkan dengan standar capaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan Tingkat capaian 96%, hal ini berarti Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sudah mendekati standar Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, namun masih berada di bawah capaian rata-rata/standar Provinsi. Diperlukan peningkatan efektivitas pelayanan administrasi agar setara atau melampaui standar Provinsi untuk tahun 2026.

- Pada Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD jika dibandingkan dengan standar capaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan Tingkat capaian 94%, Indikator ini menunjukkan selisih yang lebih besar dibanding indikator pertama. Kinerja masih cukup jauh dari standar Provinsi, sehingga perlu penguatan dalam sistem dukungan tugas dan fungsi DPRD, termasuk peningkatan kualitas koordinasi dan manajemen layanan untuk tahun 2026

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1. 7
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Target Tahun 2025
1	2		3	4	5	6
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	65	66	102
		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	100	85	85
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72.45	72.5	100

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan Adalah sebagai berikut:

a. Pada indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan

Sekretariat DPRD tercapai sebesar 102% adapun upaya – upaya yang sudah dilakukan yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif DPRD

Sekretariat DPRD secara konsisten meningkatkan ketepatan waktu, ketelitian, dan kelengkapan pelayanan administrasi bagi pimpinan dan anggota DPRD, khususnya dalam fasilitasi rapat-rapat DPRD, kegiatan reses, kunjungan kerja, serta penyusunan dokumen kedewanan.

2) Optimalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan berdasarkan SOP yang jelas dan terstandarisasi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna layanan. Evaluasi dan penyesuaian SOP dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.

3) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM

Aparatur Sekretariat DPRD didorong untuk meningkatkan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, serta pembinaan internal, sehingga mampu memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan

Penggunaan teknologi informasi, seperti pengelolaan agenda DPRD, surat-menyurat, dokumentasi kegiatan, dan penyediaan data/informasi, turut meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan kepada anggota DPRD dan stakeholder terkait.

5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung yang Memadai

Dukungan sarana dan prasarana kerja yang representatif, termasuk ruang rapat, perlengkapan persidangan, serta fasilitas pendukung

lainnya, memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kedewanan.

6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasilnya

Sekretariat DPRD melaksanakan survei kepuasan pelayanan secara rutin sebagai bahan evaluasi. Masukan dan saran dari pengguna layanan ditindaklanjuti secara nyata untuk perbaikan kualitas pelayanan ke depan.

7) Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif

Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, serta pihak terkait lainnya turut meningkatkan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan.

Hambatan dan Solusi pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

1) **Hambatan:** Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kompetensi SDM belum sepenuhnya ideal untuk mendukung dinamika dan intensitas kegiatan DPRD yang tinggi, terutama pada periode agenda padat.

Solusi:

Dilakukan optimalisasi pembagian tugas, peningkatan koordinasi antarbagian, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan internal guna memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

2) **Hambatan:** Tingginya Dinamika dan Perubahan Agenda DPRD

Perubahan jadwal kegiatan DPRD yang sering terjadi memerlukan kesiapan dan respons cepat dari Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan.

Solusi:

Sekretariat DPRD meningkatkan fleksibilitas dan kesiapsiagaan

aparatur, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi internal maupun dengan pimpinan dan anggota DPRD agar penyesuaian agenda dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

3) **Hambatan:** Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sebagian sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal pelayanan kedewanan.

Solusi:

Dilakukan pemeliharaan dan optimalisasi sarana prasarana yang ada serta pengusulan pemenuhan fasilitas secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan.

4) **Hambatan:** Tuntutan Kualitas Pelayanan yang Semakin Tinggi

Ekspektasi pimpinan dan anggota DPRD terhadap kualitas pelayanan terus meningkat seiring dengan tuntutan kinerja lembaga legislatif.

Solusi:

Sekretariat DPRD terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan melalui penerapan SOP, peningkatan kedisiplinan aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

5) **Hambatan:** Pengelolaan Masukan dan Pengaduan Pengguna Layanan

Masukan dan saran dari pengguna layanan belum seluruhnya terdokumentasi dan terkelola secara sistematis.

Solusi:

Dilakukan penguatan mekanisme survei kepuasan pelayanan serta tindak lanjut hasil survei sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

- b. Pada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu tercapai sebesar 85% adapun upaya – upaya yang sudah dilakukan yaitu:

1) Perencanaan dan Penjadwalan Pembahasan Produk Hukum Daerah

Sekretariat DPRD menyusun perencanaan dan penjadwalan pembahasan produk hukum daerah secara terstruktur dan terkoordinasi bersama alat kelengkapan DPRD dan perangkat daerah pengusul, sehingga proses fasilitasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan.

2) Peningkatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengusul

Dilakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait guna memastikan kelengkapan bahan, naskah akademik, dan dokumen pendukung produk hukum daerah tersedia tepat waktu untuk mendukung kelancaran proses pembahasan.

3) Optimalisasi Peran Sekretariat dalam Fasilitasi Pembahasan

Sekretariat DPRD berperan aktif dalam menyiapkan administrasi persidangan, notulensi, dokumentasi, serta dukungan teknis lainnya dalam setiap tahapan pembahasan rancangan produk hukum daerah.

4) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Produk Hukum

Proses fasilitasi pembahasan produk hukum daerah dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, sehingga alur kerja menjadi lebih jelas, terukur, dan dapat dikendalikan dari sisi waktu pelaksanaan.

5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparatur Sekretariat DPRD yang menangani fasilitasi produk hukum daerah didorong untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pembinaan internal dan kegiatan peningkatan kompetensi.

- 6) Pemantauan dan Evaluasi Progres Pembahasan Produk Hukum
Sekretariat DPRD secara berkala melakukan pemantauan terhadap progres pembahasan produk hukum daerah untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan dan melakukan langkah antisipatif agar target waktu dapat tercapai.

Hambatan dan Solusi pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu

- 1) **Hambatan:** perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi dasar penyusunan produk hukum tersebut

Perubahan regulasi ini mengharuskan dilakukan penyesuaian substansi, harmonisasi ulang, serta kajian tambahan, sehingga proses pembahasan dan penetapan produk hukum mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan.

Solusi:

Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian jadwal pembahasan produk hukum, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah pengusul dan instansi terkait, serta memfasilitasi pembahasan ulang agar substansi produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan tetap berkualitas, sesuai regulasi, dan memiliki kepastian hukum meskipun membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang.

- 2) **Hambatan:** Dinamika Pembahasan di Alat Kelengkapan DPRD.

Pembahasan produk hukum daerah sering mengalami penyesuaian waktu akibat perubahan agenda, perbedaan pandangan, dan kebutuhan pendalaman materi.

Solusi:

Sekretariat DPRD meningkatkan fleksibilitas penjadwalan, kesiapan administrasi, serta dukungan teknis agar setiap perubahan agenda

dapat segera diakomodasi tanpa mengganggu target waktu penyelesaian

3) **Hambatan:** Keterbatasan Sumber Daya Manusia Teknis

Jumlah dan kompetensi aparatur yang menangani fasilitasi produk hukum daerah masih terbatas dibandingkan dengan volume dan kompleksitas pembahasan.

Solusi:

Dilakukan optimalisasi pembagian tugas, peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pelatihan, serta pemanfaatan kerja tim lintas bagian untuk mendukung kelancaran fasilitasi.

4) **Hambatan:** Kompleksitas Materi Produk Hukum Daerah

Sebagian produk hukum daerah memiliki substansi yang kompleks dan memerlukan pembahasan mendalam serta konsultasi lanjutan dengan instansi terkait.

Solusi:

Sekretariat DPRD memfasilitasi koordinasi dan konsultasi teknis dengan pihak terkait sejak tahap awal pembahasan guna meminimalkan revisi dan mempercepat proses penyelesaian.

5) **Hambatan:** Keterbatasan Waktu Pembahasan

Keterbatasan waktu pembahasan akibat padatnya agenda DPRD berdampak pada tidak optimalnya penyelesaian seluruh produk hukum sesuai target.

Solusi:

Sekretariat DPRD melakukan pemantauan progres secara berkala dan mengusulkan penyesuaian jadwal pembahasan secara prioritas terhadap produk hukum daerah yang mendesak.

6. Pada indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD tercapai sebesar 100% adapun upaya – upaya yang sudah dilakukan yaitu:

- 1) Penguatan Perencanaan Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan Daerah
Sekretariat DPRD memastikan keselarasan antara Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja tersusun secara jelas dan terukur.
- 2) Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja yang Tepat
Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD guna mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.
- 3) Penguatan Pelaksanaan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
Sekretariat DPRD melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala dan menyusun laporan kinerja secara tepat waktu dan akurat, sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkesinambungan.
- 5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Aparatur Sekretariat DPRD didorong untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait penerapan SAKIP melalui pembinaan, koordinasi internal, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- 6) Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja
Sekretariat DPRD memanfaatkan sistem informasi kinerja dalam mendukung proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan

kinerja sehingga data kinerja lebih tertata, terintegrasi, dan mudah ditelusuri.

7) Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP

Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat atau instansi berwenang ditindaklanjuti secara konsisten sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Hambatan dan Solusi pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

1) **Hambatan:** Pemahaman Aparatur terhadap SAKIP yang Belum Merata

Tidak seluruh aparatur memiliki tingkat pemahaman yang sama terkait implementasi SAKIP, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan.

Solusi:

Dilakukan pembinaan dan pendampingan internal secara berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi antarbagian guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan kualitas penerapan SAKIP.

2) **Hambatan:** Kualitas Perencanaan dan Indikator Kinerja yang Perlu Penyempurnaan

Sebagian indikator kinerja memerlukan penyempurnaan agar lebih terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Solusi:

Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian dan penyempurnaan indikator kinerja agar selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi serta mendukung peningkatan nilai SAKIP.

3) **Hambatan:** Keterbatasan Data dan Dukungan Eviden Kinerja

Pengumpulan data dan bukti dukung kinerja belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis.

Solusi:

Dilakukan penguatan sistem dokumentasi dan pengarsipan kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja untuk memastikan data dan eviden tersedia secara lengkap dan akurat.

4) **Hambatan:** Monitoring dan Evaluasi yang Belum Optimal

Monitoring dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan terstruktur di seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

Solusi:

Sekretariat DPRD meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar pengendalian dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

5) **Hambatan:** Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi yang Memerlukan Penguatan

Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP memerlukan tindak lanjut yang lebih terkoordinasi.

Solusi:

Dilakukan penguatan komitmen pimpinan dan koordinasi lintas bagian dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi SAKIP secara tepat waktu dan berkelanjutan.

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dan sasarannya pada tahun 2025 sebanyak Rp. 65.947.529.614,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.848.534.785,- atau 96,82% terdapat efisiensi sebesar 3,18%. Sasaran pertama, Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 22.046.118.580,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.351.528.725,- atau 96,85% terdapat efisiensi sebesar 3,15%. Sasaran kedua, Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

didukung anggaran sebesar Rp. 43.901.411.034,- dengan realisasi sebesar Rp.42.947.006.060,- atau 96,80% terdapat efisiensi sebesar 3,20%. Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.8

Tabel 3.1. 8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran 2025			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% capaian	
1	2		5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		65	66	102	65,947,529,614	63,848,534,785	96.82	1.05
2		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	85	85	22,046,118,580	21,351,528,725	96.85	-
3		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	72.45	72.5	100	43,901,411,034	42,497,006,060	96.80	1.03

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kinerja Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) indikator sasaran, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung.

Pada tujuan pertama diwujudkan dengan 2 (dua) sasaran yang mempunyai 2 (dua) indikator sasaran, yaitu sasaran pertama Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu memiliki tingkat capaian sebesar 85% sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 96%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 89%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang Tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Indikator sasaran kedua Nilai SAKIP Sekretariat DPRD memiliki tingkat capaian sebesar 100% sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 99,59%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 99,59%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara keseluruhan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1.9

Tabel 3.1. 9
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		99.59	MENUNJANG
2		Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	85	Bagian Umum	Persentase ketercapaian kegiatan bagian umum	100	
3		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100	Bagian Program dan Keuangan	Persentase ketercapaian kegiatan bagian program dan keuangan	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan	Prosentase ketercapaian kegiatan bagian Fasilitas Penganggaran dan pengawasan	89	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersedia	100	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	100	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah	100	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	96	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	100	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah yang tersedia	100	
					Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang melaksanakan medical check up	89	
					Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	100	
					Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi Fraksi DPRD	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100	
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		96	MENUNJANG
					Bagian Persidangan dan perundang-undangan	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat Paripurna	100	
					Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	100	
					Bagian Umum	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	67	
					Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	100	
					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang diselenggarakan	0	
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang tersusun	100	
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS yang tersusun	100	
					Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	100	
					Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	100	
					Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	100	
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraa n Pemerintahan	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	100	
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah	100	
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100	
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah paket kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang terlaksana	100	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah laporan penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD	100	
					Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	100	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	
					Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan reses DPRD	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100	
					Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	100	
					Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	100	
					Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	100	
					Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						daerah		
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD	100	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100	
						Perjalanan Dinas Luar pulau	100	
						Perjalan Dinas Luar Provinsi	100	
						Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 3 hari	100	
						Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 hari	100	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang tersusun	100	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100	
					Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	100	
					Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	100	

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan mendapat Anggaran sebesar Rp.65.947.529.614,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.63.848.534.785,- atau 96,82%

Anggaran sejumlah Rp.65.947.529.614,-, dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp.62.446.357.714,- dan belanja modal sebesar Rp3.501.171.900,-.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp.60.443.773.039,- atau 96,79 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 62.446.357.714,- sedangkan belanja modal dari anggaran yang ada sebesar Rp3.501.171.900,- direalisasikan sebesar Rp. 3.404.761.746,- atau 97,25 %.

Pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi kinerja keuangan Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 42,497,006,060,- atau 96.80 % dari anggaran sebesar Rp. 43,901,411,034 ,- ,realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. 1
Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan: Urusan Pemerintahan/Penunjang Pemerintahan Umum					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		43,901,411,034	42,497,006,060	96.80
	Bagian Umum	Persentase ketercapaian kegiatan bagian umum	9,491,887,590	9,038,632,548	
	Bagian Program dan Keuangan	Persentase ketercapaian kegiatan bagian program dan keuangan	34,118,523,444	33,231,149,012	
	Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan	Prosentase ketercapaian kegiatan bagian Fasilitas Penganggaran dan pengawasan	291,000,000	227,224,500	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersedia	6,910,000	5,337,200	77.24
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,500,000	3,500,000	100.00
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,410,000	1,837,200	53.88

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	5,529,223,300	4,867,942,283	88.04
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	5,285,897,000	4,653,872,513	88.04
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	243,326,300	214,069,770	87.98
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	50,000,000	46,000,000	92.00
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50,000,000	46,000,000	92.00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	820,916,250	794,706,427	96.81
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14,000,000	10,841,000	77.44
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70,000,000	68,812,126	98.30

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	330,000,000	325,714,850	98.70
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125,000,000	117,818,750	94.26
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	182,316,250	177,519,700	97.37
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,600,000	94,000,001	94.38
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah	3,707,757,400	3,591,826,256	96.87
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2,034,692,500	2,029,550,000	99.75
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	125,536,700	118,730,300	94.58
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	975,128,200	894,852,906	91.77
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	572,400,000	548,693,050	95.86

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	1,057,471,600	954,026,814	90.22
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	349,141,600	297,680,825	85.26
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708,330,000	656,345,989	92.66
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	1,995,370,000	1,832,822,476	91.85
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	218,000,000	203,589,526	93.39
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87,500,000	65,331,800	74.66
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15,000,000	14,064,000	93.76
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105,000,000	94,086,240	89.61

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,569,870,000	1,455,750,910	92.73
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	29,429,365,234	29,137,874,504	99.01
1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	28,476,574,844	28,274,258,474	99.29
1.8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan pakaian adat daerah yang tersedia	661,790,390	636,391,530	96.16
1.8.3	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang melaksanakan medical check up	291,000,000	227,224,500	78.08
1.9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	1,304,397,250	1,266,470,100	97.09
1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi Fraksi DPRD	3,500,000	3,060,000	87.43
1.9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1,300,897,250	1,263,410,100	97.12

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Realisasi kinerja keuangan Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2025 adalah sebesar Rp. **21,351,528,725,-** atau 96.85 % dari anggaran sebesar Rp. **22,046,118,580,-** Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2. 2
Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	Urusan Pemerintahan: Urusan Pemerintahan/Penunjang Pemerintahan Umum				
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		22,046,118,580	21,351,528,725	96.85
	Bagian Persidangan dan perundang-undangan	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat Paripurna	3,172,453,590	2,877,337,475	90.70
	Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	669,912,160	597,163,848	89.14
	Bagian Umum	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	18,203,752,830	17,877,027,402	98.21
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	151,578,800	127,503,000	84.12

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	3,223,800	2,458,000	76.25
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang diselenggarakan	15,000,000	-	-
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang tersusun	133,355,000	125,045,000	93.77
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	122,556,160	118,219,000	96.46
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS yang tersusun	28,228,760	27,721,200	98.20
2.2.2	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	67,922,100	64,145,200	94.44
2.2.3	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	3,240,000	3,240,000	100.00
2.2.4	Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	23,165,300	23,112,600	99.77
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	281,116,800	226,449,000	80.55
2.3.1	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	248,942,500	194,464,000	78.12

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.3.2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Peratnggungjawaban Kepala Daerah	32,174,300	31,985,000	99.41
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	3,735,797,810	3,297,307,158	88.26
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	2,753,830,000	2,568,066,810	93.25
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah paket kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang terlaksana	731,123,450	491,572,900	67.24
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah laporan penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD	242,576,860	236,985,448	97.69
2.4.4	Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	8,267,500	682,000	8.25
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	2,279,153,620	2,253,779,675	98.89
2.5.1	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan reses DPRD	2,279,153,620	2,253,779,675	98.89
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	12,054,600	11,500,800	95.41
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	9,341,300	8,787,500	94.07

No	Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.6.2	Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2,713,300	2,713,300	100.00
2.7	Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	3,340,240	3,327,600	99.62
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	3,340,240	3,327,600	99.62
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD	15,460,520,550	15,313,442,492	99.05
2.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	15,449,922,830	15,308,960,592	99.09
		Perjalanan Dinas Luar pulau			-
		Perjalan Dinas Luar Provinsi			-
		Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 3 hari			-
		Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 hari			-
2.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang tersusun	2,650,320	550,200	20.76
2.8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2,922,500	1,820,200	62.28
2.8.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	2,345,000	418,500	17.85
2.8.5	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	2,679,900	1,693,000	63.17

3) Inovasi

Inovasi dalam rangka mendukung publikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pekalongan selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Untuk menyebarkan informasi hukum terkait kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024, memiliki aplikasi jaringan data dan informasi hukum yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi dalam rangka memajukan Kabupaten Pekalongan
2. Pada tahun 2024 mulai ada Website DPRD Kabupaten Pekalongan didalamnya memuat kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang terkini dan selalu terupdate, sehingga dari website semua kalangan masyarakat bisa melihat dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung dan mengawasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan.
3. Rencana pada awal tahun 2026 akan mulai Pembuatan aplikasi E-Reses dimaksudkan untuk mendukung digitalisasi proses penjangkauan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data hasil reses, serta mempermudah pelaporan dan pemantauan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

4) Penghargaan

Tabel 3.4. 1
Prestasi Urusan Pemerintahan Umum (Sekretariat Dprd) Kabupaten
Pekalongan Tahun 2025

No	Pengawasan	Tingkat Prestasi (Provinsi/Nasional)	Data Dukung (Foto/Piagam/Sertifikat/Lainnya)
	SETWAN	NIHIL	

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata – rata capaian kinerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebesar 96% tercapai dengan kategori Baik, yang terdiri dari indikator tujuan sebanyak 1 (satu) dan indikator sasaran sebanyak 2 (dua) adapun indikator Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu yang tercapai dalam kategori "Baik", sedangkan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD tercapai dalam kategori "Istimewa".
2. Faktor pendorong tercapainya target kinerja antara lain: adanya sinergi dalam perumusan kebijakan dan implemenasinya, pelaksanaan koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampunan serta adanya kolaborasi dan kerjasama daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
3. Anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebanyak Rp.65.947.529.614,- dengan realisasi sebesar Rp.63.848.534.785,- atau 96,82% terdapat efisiensi sebesar 3,18%.
4. Kinerja Tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran strategis, yang seluruhnya tercapai secara sinergis dengan kinerja program dan kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi DPRD yang mendukung sebesar 96 % terhadap sasaran pertama Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu memiliki tingkat capaian sebesar 85%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 89%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang Tinggi. Dan Indikator sasaran kedua Nilai SAKIP Sekretariat DPRD memiliki tingkat capaian sebesar 100% sedangkan rata-rata tingkat capaian program yang mendukung sasaran tersebut sebesar 99,59%. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat tingkat kesesuaian sebesar 99,59%, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.2 Rekomendasi

Keberhasilan pelayanan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lepas dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait.

Keterbatasan sumber daya dan kendala-kendala yang muncul menjadi permasalahan yang senantiasa menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senantiasa berusaha mengoptimalkan kondisi yang ada guna meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD.

a. Permasalahan

1) Sumber Daya Manusia

Permasalahan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sudah lama ada dan selalu

menjadi permasalahan yang krusial karena menyangkut pada pelaksanaan tugas DPRD dan pelaksanaan tugas teknis Administrasi pada Sekretariat DPRD yang mempunyai kriteria khusus dan paham akan :

- a) Pengorganisasian dan Pengelolaan persidangan
- b) Ilmu Hukum dan Sosial Politik
- c) Ekonomi Pembangunan, Akuntansi dan Keuangan daerah
- d) Manajemen Kesekretariatan DPRD

Disamping Sumber daya Manusia yang paham kriteria tersebut diatas diperlukan pula karyawan yang paham dan ahli dalam bidang software dan hard ware Komputer karena di Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan terdapat perangkat komputer/Laptop yang jumlahnya cukup banyak dan dibutuhkan aplikasi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, apalagi dengan adanya Website DPRD Kabupaten Pekalongan dan beban kerja Sekretariat DPRD yang semakin berat, secara kuantitas dengan jumlah ASN 42 orang masih dibutuhkan tenaga profesional terutama dalam bidang Software, hardware, tenaga operator Website DPRD Kabupaten Pekalongan dan Petugas Protokol/MC.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Sekretariat DPRD telah berusaha memenuhi sebagian fasilitas sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD, dengan dipinjamkannya Laptop sebagai fasilitas penunjang kerja dan tersedianya jaringan internet.

2) Sarana dan prasarana

Perkembangan kebutuhan ruang pertemuan maupun ruang kerja DPRD masih diperlukan, antara lain :

- a) Ruang Penyimpanan Perlengkapan Rumah tangga
- b) Ruang Pertemuan serba guna untuk menerima aspirasi masyarakat
- c) Ruang kerja staf dan Kasubag yang representatif
- d) Ruang Arsip yang memadai

Ruang perlengkapan rumah tangga merupakan sarana untuk menyimpan perlengkapan rumah tangga saat ini penyimpanan perlengkapan rumah tangga masih terpisah-pisah sehingga menyulitkan pengelolaan dan pengawasan

Penyampaian aspirasi/demonstrasi dari masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat perlu pelayanan yang memadai, selama ini sering diterima di ruang rapat Paripurna. Untuk itu diperlukan ruang tersendiri yang representatif.

b. Usaha-Usaha mengatasi permasalahan

- 1) Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, dengan memberikan tugas rangkap dan tambahan beban kerja kepada karyawan
- 2) Usaha Sekretariat DPRD untuk memberikan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas DPRD dengan memaksimalkan sarana yang ada
- 3) Memaksimalkan kondisi ruang yang ada dengan memanfaatkan fungsi ruangan untuk dipakai rangkap.

c. Analisa Permasalahan

Melihat permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya peningkatan pendidikan/Ilmu pengetahuan khususnya yang mendukung kegiatan Bagian Persidangan khususnya Sub Bagian Protokol dan Tenaga teknis komputer.
- 2) Penambahan ruangan serbaguna untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat/demonstrasi.
- 3) Perlu Peningkatan pemeliharaan terhadap administrasi, dokumen/produk-produk DPRD dan arsip DPRD, dengan kata lain diperlukan ruang perpustakaan yang nyaman dan bersih.
- 4) Penambahan dan penataan ruangan untuk staf dan Kasubag agar lebih nyaman dan representatif buat bekerja. Saran-saran tersebut yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang.

4.3 Hal – Hal Yang Dicapai Di Tahun Mendatang

- 1) Peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD melalui studi komparasi sesuai kebutuhan untuk mengetahui perubahan kebijakan nasional dan situasi serta kondisi yang terjadi pada masyarakat.
- 2) Publikasi kegiatan DPRD untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten pekalongan
- 3) Peningkatan komunikasi politik antara DPRD dengan para konstituen dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat

- 4) Peningkatan pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Daerah
- 5) Peningkatan pelayanan administrasi umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 6) Pengoptimalan pemanfaatan ketersediaan barang miik daerah dengan melaksanakan pemeliharaan yang baik agar terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara lancar dan terkendali
- 7) Pengoptimalan penyusunan perencanaan dan administrasi keuangan
- 8) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPRD
- 9) Peningkatan kenyamanan hidup DPRD melalui pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
- 10) Peningkatan kualitas produk legislasi yang mendukung tercapainya program-program pemerintah daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kajen, 31 Januari 2026

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP
NIP.19791204 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sindoro No.1 Desa Nyamok Kecamatan Kajen 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id
kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](#)
[dprd_kab_pekalongan](#) & [jdih_dprd_kab_pekalongan](#)

SURAT PERINTAH

Nomor : 172/

Nama : HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

- a. Nama/jabatan :
1. Siswo Handoyo, SH, MM - Plt. Kabag. Program dan Keuangan
 2. Komarudin, S.Kom, MM - SubKoord Akuntansi & pelaporan
 3. Bambang Sudaryo, SE - Staf
 4. Ratna.T.W, SE - Staf
- b. Keperluan : Untuk kepentingan dinas Saudara ditugaskan sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.

Demikian untuk dilaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kajen

Pada tanggal : Desember 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP
NIP.19791204 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sindoro No.1 Desa Nyamok Kecamatan Kajen 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id

kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](https://www.facebook.com/DprdKabPekalongan)

[dprd_kab_pekalongan](#) & [jdih_dprd_kab_pekalongan](#)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/

Nama : YUDHIHIMAWAN, ST, M.Sc, MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama : Sebagaimana tersebut dalam lampiran
Jabatan : Sebagaimana tersebut dalam lampiran
Untuk : Menjadi tim penyusun pengumpulan Data Kinerja tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Demikian untuk dilaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab .

Ditetapkan di Kajen,

Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHIHIMAWAN, ST, M.Sc, MT

Pembina Utama Muda

NIP.19790511 200502 1 003

Lampiran I

Surat Keputusan Sekretaris
DPRD
Kabupaten Pekalongan
Nomor : 800/
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	BERTUGAS SEBAGAI
1	YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT	Sekretaris DPRD	Pengarah
2	Dra. Nuryatul Falaah	Kabag. Program dan Keuangan	Ketua
3	Winarso, SE	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4	Moch. Arifin, SH, MH	Kabag. Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Sekretaris
3	Drs. Rukman Hidayat, AP	Kabag. Umum	Anggota
4	Juni Karjawati, S.IP	Kasubag TU	Anggota
5	Setiyorini, SE	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
6	Sapto Wahono, SH	Perisalah legislatif Ahli muda	Anggota
7	Siti Alrofiah, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8	Siti Baidiyah Apriyanti, SS, MM	Penata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
9	Siswo Handoyo, SH, MM	Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli muda	Anggota
10	Komarudin ,S.Kom, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11	Eny Kusmiyati, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12	Dewi Eko Setiyowati, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13	Shinta Damayanti, SH, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14	Bambang Sudaryo, SE	Staf	Anggota
15	Ratna.T.Widyaningrum, SE	Staf	Anggota

SEKRETARIS,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT
NIP.19790511 200502 1 003

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LKJIP tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis (PPTK) yang telah membantu dalam mengukur, mengevaluasi, menganalisa dan menjabarkan sehingga terbentuk LKJIP.

Demikian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini.

Kajen, 4 Februari 2026

SEKRETARIS

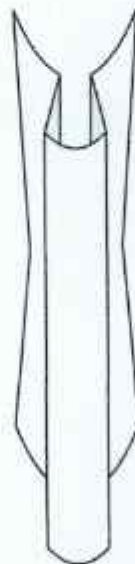
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP
NIP.19791204 199810 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PEKALONGAN
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M
Jabatan : Bupati Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA

FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M

PIHAK PERTAMA

YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

NAMA PEJABAT : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Sasaran strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	94 %
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Implementase tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.004.512.900,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 26.553.003.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M

YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan perundang-undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2024

Pihak Kedua


YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Pihak Pertama


MOCH. ARIFIN, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NAMA PEJABAT : MOCH. ARIFIN, SH.MH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Implementase tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	27.5%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturann DPRD	100%
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	40%
3	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	80%

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 1.229.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2024
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 310.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2024
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 905.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2024
3	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2024

Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN

YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAPTO WAHONO, S.IP
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda / Sub Koordinator Persidangan dan Risalah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA


MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA


SAPTO WAHONO, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19691227 199003 1 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH

NAMA PEJABAT : SAPTO WAHONO, S.IP
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20%
1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terpenuhinya Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen
II	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	80%
1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terpenuhinya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terpenuhinya Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terpenuhinya Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen

No. Kegiatan dan Sub Kegiatan

I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp	10.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp	10.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp	14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp	3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp	3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp	3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Rp	3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH

SAPTO WAHONO
Penata Tingkat I
NIP. 19691227 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS.,MM
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA


MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA


SITI BAIDYAH A, SS.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770424 201001 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

NAMA PEJABAT : SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS.,MM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			3	4
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD		20%
1	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD		12 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 952.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 952.600.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**


 MOCH. ARIFIN, SH.MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690205 19903 1 005

Kajen, Januari 2025

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA


 SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS.,MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19770424 201001 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Perancang Perundang-undangan Ahli Muda / Sub Koordinator Kajian Peraturan Perundang - undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR KAJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

NAMA PEJABAT : SISWO HANDOYO, SH.,MM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturann DPRD	100%
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	4 Dokumen
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
3.	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terpenyuhinya Dokumen Naskah Akademik dan Perda Inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 168.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Rp 15.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp 150.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

**KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

MOCH. ABIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

Kajen, Januari 2025

**PERANCANG
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR KAJIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

Pihak Kedua


YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Pihak Pertama


Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN UMUM

NAMA PEJABAT : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Program & Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	38,8%
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD	100%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	100%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	50%
4	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan administrasi bagi DPRD	100%

No.	Program dan Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Layanan Administrasi DPRD

Anggaran	Keterangan
Rp 1.940.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp. 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 676.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 310.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 903.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN

YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMARUDIN, S.Kom.,MM
Jabatan : Plt. Kasubag Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

Pihak Kedua

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

Pihak Pertama

KOMARUDIN, S.Kom.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUBAG. PERLENGKAPAN**

**NAMA PEJABAT : KOMARUDIN, S.Kom.,MM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	14%
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	60%
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	80%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan
3.	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhnya pemeliharaan mebel	10 unit
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Pemeliharaan Mebel
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran	Keterangan
Rp 14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 684.400.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 112.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 572.400.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 340.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 168.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 87.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 15.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 70.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

Plt. KASUBAG PERLENGKAPAN

KOMARUDIN, S.Kom., MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIYORINI, SE
Jabatan : Kasubag Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

Pihak Kedua

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

Pihak Pertama

SETIYORINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700717 199403 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBAG. RUMAH TANGGA**

**NAMA PEJABAT : SETIYORINI, SE
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	20 Orang
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	50%
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	12 Laporan
1.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20%
IV	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan administrasi bagi DPRD	1 Unit
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	50%
V	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	219 Kali
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20%
			128 Dokumen

No	Kegiatan dan sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 480.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 180.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 150.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 150.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.181.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.181.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
IV	Layanan Administrasi DPRD	Rp. 900.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 900.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
V	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 20.105.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 20.105.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

KASUBAG RUMAH TANGGA

Handwritten signature

SETIYORINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700717 199403 2 007

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Handwritten signature
Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNI KARJAWATI, S.IP
Jabatan : Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen Januari 2025

Pihak Kedua

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

Pihak Pertama

JUNI KARJAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710610 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBAG. TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

NAMA PEJABAT : JUNI KARJAWATI, S.IP
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	33%
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	50%
1.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	26 Unit
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	38 Unit
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD	50%
1.	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
IV	Layanan Keuangan dan Kesojahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesojahteraan DPRD	33%
1.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	5 Paket
V	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan administrasi bagi DPRD	50%
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Bulan
VI	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	25%
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pimpinan dan Anggola DPRD yang mengikuti pendalaman tugas	6 Kali

No	Kegiatan dan sub Kegiatan	Anggaran
I	Administral Umum Perangkat Daerah	Rp 182.500.000,00
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 70.000.000,00
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 112.500.000,00
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 950.664.900,00
1.	Pengadaan Mebel	Rp 125.536.700,00
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 825.128.200,00
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 730.830.000,00
1.	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp 730.830.000,00
IV	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 700.000.000,00
1.	Penyediaan Paketan Dinas dan Atribut DPRD	Rp 700.000.000,00
V	Layanan Administrasi DPRD	Rp 900.000,00
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 900.000,00
VI	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 2.884.000.000,00
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 2.884.000.000,00

Keterangan

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

APBD Kab. Pekalongan TA 2025

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

Kajen, Januari 2025

KASUBAG TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

JUNI KARJAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710610 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NURYATUL FALAAH
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

Pihak Kedua


YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Pihak Pertama


Dra. NURYATUL FALAAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670815 199303 2 099

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

NAMA PEJABAT : Dra. NURYATUL FALAAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Program dan Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	4
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	26%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian administrasi keuangan Sekretariat DPRD	100%
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	33,3%

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.049.004.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.251.557.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 29.780.147.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN



Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Dra. NURYATUL FALAAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19570815 199303 2 089



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMARUDIN, S.Kom,MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Akuntansi & Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. NURYATUL FALAAH
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dra. NURYATUL FALAAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670815 199303 2 099

Kajen, Januari 2025
Pihak Pertama

KOMARUDIN, S.Kom, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NAMA PEJABAT : KOMARUDIN, S.Kom, MM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	50%
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	12 Laporan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	12 Bulan
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Sekretariat DPRD	12 Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RP 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RP 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RP 5.261.857.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RP 4.985.897.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RP 275.960.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

Dra. NURYATUL FALAAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670915 199303 2 099

Kajen, Januari 2025

ANALIS KEUANGAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KOMARUDIN, S.Kom, MM
Penata TK I
NIP. 19781105 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY KUSMIYATI, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Verifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. NURYATUL FALAAH
Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

Pihak Kedua

Dra. NURYATUL FALAAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670815 199303 2 099

Pihak Pertama

ENY KUSMIYATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19770124 200901 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

NAMA PEJABAT : ENY KUSMIYATI, S.Sos
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	50%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terperuhnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD	50%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
III	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	33.33%
1.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	45 orang / bulan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 310.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 310.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
III.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 29.760.147.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Rp. 29.780.147.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI

Dra. NURYATUL FALAAH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670815 199303 2 099

ENY KUSMIYATI, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19770124 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

Pihak Kedua


YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Pihak Pertama


WINARSO, SE
Pembina
NIP. 19740517 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

NAMA PEJABAT : WINARSO, SE
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Program & Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	3,7%
1	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	33,3%
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	52,5%
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20%
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%
3	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100%
4	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	100%
5	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%

- No. Program dan Kegiatan
- I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - II Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 1 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 3 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 4 Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - 5 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Anggaran	Keterangan
Rp 428.114.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 428.114.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 2.417.178.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 250.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 2.023.678.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 133.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 7.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN


WINARSO, SE
Pembina

NIP. 19740517 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ALROFIAH, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA

WINARSO, SE
Pembina

NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA

SITI ALROFIAH, S.H
Penata Tingkat I

NIP. 19690531 199710 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN

NAMA PEJABAT : SITI ALROFIAH, SH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100%
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen
2.	Pembahasan APBD	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen
3.	Pembahasan Laporan Semesteran	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen
4.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen

No. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1 Pembahasan Kebijakan Anggaran

1 Pembahasan KUA dan PRAS

2 Pembahasan APBD

3 Pembahasan Laporan Semesteran

4 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Anggaran Keterangan

Rp 133.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Rp 33.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Rp 45.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Rp 25.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Rp 30.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Januari 2025

KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN


W. J. R. S. E.
Pembina

NIP. 19740517 199803 1 002

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN



SITI ALROBBIAH, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19690531 199710 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

WINARSO, SE
Pembina
NIP. 19740517 199803 1 002

DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19870520 201101 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN

NAMA PEJABAT : DEWI EKO SETIYOWATI, SH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
I	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	33%
1.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang
II	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	100%
1.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8 Dokumen
2.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terpenuhinya Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen
III	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%
1.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya Dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen
2.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terpenuhinya Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 428.114.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 428.114.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 201.725.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 150.625.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 51.100.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
III	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 7.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina
NIP. 19740517 199803 1 002

Kajen, Januari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
/ SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN



DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19870520 201101 2 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA DAMAYANTI SH, MM

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami:

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajene, Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

WINARSO, SE

Pembina

NIP. 19740517 199803 1 002

SHINTA DAMAYANTI, SH, MM

Pembina

NIP. 19770523 199603 2 002

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 250.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 250.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Penyediaan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 2.023.678.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Pelaksanaan Reses	Rp 2.023.678.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
III	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGAN DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina
NIP. 19740517 199803 1 002

Kajen, Januari 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
/ SUB KOORDINATOR KERJASAMA
DAN ASPIRASI

SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Pembina
NIP. 19770523 199603 2 002

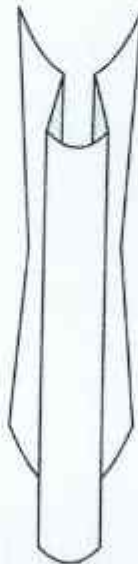
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI

NAMA PEJABAT : SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20%
1.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	12 Bulan
II	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat	100%
1.	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	3 Dokumen
III	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	100%
1.	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terpenuhinya Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PEKALONGAN
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M
Jabatan : Bupati Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 1 Oktober 2025



PIHAK KEDUA
Bupati Pekalongan

Dr. FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD



YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Tujuan Dan Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	4	5
1.1	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	85	Indeks
1.2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100	Persen
			72,45	Angka

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 43.901.411.034,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 22.046.118.580,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, / Oktober 2025



Dr. FADIA ARAFIO, S.E., M.M

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD



YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD



YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511-200502 1 003

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah	26	Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.009.639.144,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.910.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.529.223.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 26.476.574.844,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD



YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

Kajen, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
PIU KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN



SISWO HANDOYO, SH, MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIYORINI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

SETIYORINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700717 199403 2 007

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 330.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 182.316.250,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 99.600.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.569.870.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
6.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 1.300.897.250,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
7.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 15.449.922.830,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

SETYORINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700717 199403 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBAG. RUMAH TANGGA

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib	100	Persen
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Orang
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum	50	Persen
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	perkantoran yang tertib dan handal Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3	Paket
2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpoliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan	20	Person
1.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit
IV	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD secara	50	Persen
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	tertib dan terdokumentasi Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	219	Kali
V	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi secara optimal	20	Persen
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62	Dokumen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD


YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN


WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 291.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungs DPRD	Rp 291.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 2.940.798.280,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 242.576.860,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 2.279.153.620,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 122.556.160,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
5	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp 281.116.800,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 3.340.240,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
		Rp 12.054.600,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN



WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD



YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

No.	Sasaran Program 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
I	Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	3,7	Persen
II	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitas	100	Persen
		Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	25	Persen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNI KARJAWATI, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN-UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

JUNI KARJAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710610 199603 2 002

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 70.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 125.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Pengadaan Mebel	Rp 125.538.700,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 975.128.200,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
5.	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp 708.330.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
6.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 661.790.390,00	APBD Kab. Pekalongan TA 202
7.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
8.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 2.753.830.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM



Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN



JUNI KARJAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710610 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBAG. TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum	33	Persen
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perkantoran yang tertib dan handal Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terponuhnya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan	50	Persen
1.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	31	Unit
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	77	Unit
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	50	Persen
1.	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan
IV	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terselurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	33	Persen
1.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5	Paket
V	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	50	Persen
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	6	Bulan
VI	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya dukungan peningkatan kapasitas DPRD yang efektif dan profesional	25	Persen
1.	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	6	Kali



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAPTO WAHONO, S.IP
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda / Sub Koordinator Persidangan dan Risalah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA
PERISALAH LEGISLATIF
AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN & RISALAH

SAPTO WAHONO, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19691227 199003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20	Persen
1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	2	Dokumen
II	Facilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	80	Persen
1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	1	Laporan
2	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	Dokumen
3	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksanannya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	Dokumen
4	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksanannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan
I	Peningkatan Kapasitas DPRD
1.	Penyusunan Program Kerja DPRD
II	Fasilitasi Tugas DPRD
1.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
3.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

Anggaran	Keterangan
Rp 8.267.500,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 8.267.500,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 10.597.720,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 2.650.320,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 2.922.500,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 2.345.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
Rp 2.679.900,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH

SAPTO WAHONO
Penata Tingkat I
NIP. 19691227 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS.,MM
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA

SITI BAIDYAH A. SS.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770424 201001 2 0

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturann DPRD	100%	Persen
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	Dokumen
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	Dokumen
3.	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2 Dokumen	Dokumen
II	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20%	Persen
1	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Dokumen

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 151.578.800,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Rp 3.223.800,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Rp 15.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp 133.355.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 731.123.450,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 731.123.450,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 19903 1 005

SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770424 201001 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ALROFIAH, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
FASILITASI PENGANGGARAN

SITI ALROFIAH, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19690531 199710 2 001

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 28.228.760,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Pembahasan APBD	Rp 67.922.100,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Pembahasan Laporan Semesteran	Rp 3.240.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 23.165.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN



WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN



SITI ALROFIAH, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19690531 199710 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100	Person
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPA	2	Dokumen
2.	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	2	Dokumen
3.	Pembahasan Laporan Semesteran	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	Dokumen
4.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN


WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
FASILITASI PENGAWASAN


DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19870520 201101 2 024

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 291.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 248.942.500,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 32.174.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp 9.341.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
5.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 2.713.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN


WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
/ SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN


DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19870520 201101 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	33	Persen
1.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	45 Orang	Orang
II	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	100	Persen
1.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	9 Dokumen	Dokumen
2.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Dokumen
III	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD secara tertib dan efektif	100	Persen
1.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Dokumen
2.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMARUDIN, S.Kom,MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Akuntansi & Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI
DAN PELAPORAN

KOMARUDIN, S.Kom, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.410.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.410.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.529.223.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.285.897.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	243.326.300,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.607.092.500,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.034.692.500,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	572.400.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
ANALIS/KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KOMARUDIN, S.Kom.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003

PIHAK KEDUA
PIR. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	50%	Persen (%)
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Laporan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu	100%	Persen (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Bulan
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Dokumen
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan handal	14%	Persen (%)
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Bulan
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan	60%	Persen (%)
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	Unit
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	unit
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan	80%	Persen (%)
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	12 Bulan	Bulan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan	Bulan
3.	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	56 unit	unit
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	Bulan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY KUSMIYATI, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Verifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Program dan Keuangan

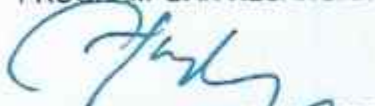
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
Plt. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN


SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI


ENY KUSMIYATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19770124 200901 2 002

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 349.141.600,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 349.141.600,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
III.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 28.476.574.844,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1.	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Rp 28.476.574.844,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
PIL. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

ENY KUSMIYATI, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19770124 200901 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	50%
I	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	50%
I	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
III	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	33,33%
I	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	14 Bulan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD


YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM


Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN UMUM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	1 Meningkatkan dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	38,8	Persen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.123.557.850,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 820.916.250,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 349.141.600,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
4	Layanan Administrasi DPRD	Rp 903.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pemrina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pemrina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan perundang-undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat paripurna	100%	Persen
		Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	50%	Persen

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 901.567.470,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 151.578.800,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 739.390.950,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3	Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 10.597.720,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN

YUDHI HIMAWAN, ST.,M.Sc.,MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19790511 200502 1 003

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN


WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
KERJASAMA DAN ASPIRASI


SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Pembina
NIP. 19770523 199603 2 002

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 242.576.850,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
2.	Pelaksanaan Reses	Rp 2.279.153.620,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025
3.	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Rp 3.340.240,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2025

Kajen, Oktober 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN


WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
/ SUB KOORDINATOR KERJASAMA
DAN ASPIRASI


SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Pembina
NIP. 19770823 199603 2 002

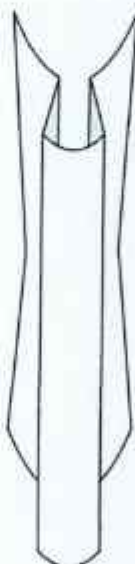
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN ASPIRASI

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya dukungan peningkatan kapasitas DPRD yang efektif dan profesional	20	Persen
1.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi DPRD	12	Bulan
II	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat secara efektif dan terintegrasi	100	Persen
1.	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	3	Dokumen
III	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terselenggaranya pembahasan kerja sama daerah yang efektif dan produktif	100	Persen
1.	Facilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Facilitasi, Verifikasi, Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2	Dokumen

..



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PEKALONGAN
TAHUN 2026**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M
Jabatan : Bupati Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Bupati Pekalongan



Dr. FADIA ARAFIQ, S.E.,M.M

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD



HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Tujuan Dan Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	66	Indeks
1.1	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	Persen
1.2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72,46	Angka

No.

Program

Anggaran

Keterangan

- | | | | | |
|---|---|----|-------------------|------------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 43.908.005.890,00 | APBD Kab. Pekalongan TA 2026 |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Rp | 22.004.079.560,00 | APBD Kab. Pekalongan TA 2026 |



Dr. FADIA ARAFIQ, S.E., M.M

Kajen, 8 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD



HARYANTO NUGROHO, S.STP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan perundang-undangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Program 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat paripurna	100%	Persen
		Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	40%	Persen

No.

Program dan Kegiatan

- 1 **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
- 1 **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**
- 2 **Peningkatan Kapasitas DPRD**
- 3 **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**
- 4 **Fasilitasi Tugas DPRD**

Anggaran

- Rp 602.412.000,00
Rp 160.212.000,00
Rp 260.000.000,00
Rp 100.000.000,00
Rp 82.200.000,00

Keterangan

- APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026



PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN

MOCH ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD



HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

PIHAK PERTAMA
PLT. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	23,3	Persen

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.241.204.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.391.057.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
3.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 33.830.147.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026



PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
Pjt. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN


SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BAGIAN UMUM

No.	Sasaran Program 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
I	Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	73,3	Persen (%)
II	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	40	Persen (%)

No.

Program dan Kegiatan

- I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 8 Layanan Administrasi DPRD
- II Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 1 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 2 Fasilitas Tugas DPRD



PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

Anggaran

Rp 4.424.524.890,00
Rp 20.000.000,00
Rp 50.000.000,00
Rp 654.000.000,00
Rp 329.000.000,00
Rp 1.080.830.000,00
Rp 706.560.000,00
Rp 604.134.890,00
Rp 980.000.000,00
Rp 18.211.330.000,00
Rp 2.761.330.000,00
Rp 15.450.000.000,00

Keterangan

APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026



HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

No.	Sasaran Program 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
I	Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	4	
II	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitas Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	3.3 100 20	Persen (%) Persen (%) Persen (%)

No

Program dan Kegiatan

- I
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
1.
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- II
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD
1.
Pembahasan Kebijakan Anggaran
2.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3.
Peningkatan Kapasitas DPRD
4.
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
6.
Pembahasan Kerja Sama Daerah

Anggaran

Rp 242.277.000,00
Rp 242.277.000,00
Rp 3.190.337.560,00
Rp 131.787.560,00
Rp 65.000.000,00
Rp 235.800.000,00
Rp 2.716.250.000,00
Rp 31.500.000,00
Rp 10.000.000,00

Keterangan

APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DPRD

HARYANTO NUGROHO, S.STP.,M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

WINARSO, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740517 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS.,MM
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA

SITI BAIDYAH A, SS.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770424 201001 2 0

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3		
I	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturann DPRD	4 100	5 Person
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	Dokumen
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2	Dokumen
3.	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	Dokumen
II	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20	Persen
1.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12	Dokumen
III	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat secara efektif dan terintegrasi	25	Persen
1.	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	400	Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan dan Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah	Rp 10.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Rp 15.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp 135.212.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
4	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp 250.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
5	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Rp 100.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


MOCH. ARIFIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA


SITI BAIDYAH APRIYANTI, SS, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19770424 201001 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAPTO WAHONO, S.IP
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda / Sub Koordinator Persidangan dan Risalah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PIHAK PERTAMA
PERISALAH LEGISLATIF
AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
PERSIDANGAN & RISALAH

SAPTO WAHONO, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19691227 199003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
I	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	20	Persen
1	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	2	Dokumen
II	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	80	Persen
1	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	1	Laporan
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	Dokumen
3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4	Dokumen



Sub Kegiatan



Anggaran

Keterangan

No.

1. Penyusunan Program Kerja DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Rp 10.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2026
Rp 10.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2026
Rp 25.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2026
Rp 25.000.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2026
Rp 22.200.000,00 APBD Kab. Pekalongan TA 2026

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIHAK PERTAMA
PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH

MOCH. ARIFIN, SH.MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

SAPTO WAHONO
Penata Tingkat I
NIP. 19691227 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
KERJASAMA DAN ASPIRASI

SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Pembina
NIP. 19770523 199603 2 002

No.

Sub Kegiatan



Anggaran



Keterangan

1. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Rp 235.800.000,00
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Rp 66.250.000,00
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
3. Pelaksanaan Reses
Rp 2.450.000.000,00
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
4. Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
Rp 10.000.000,00
APBD Kab. Pekalongan TA 2026

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
/ SUB KOORDINATOR KERJASAMA
DAN ASPIRASI

SHINTA DAMAYANTI, SH, MM
Pembina
NIP. 19770523 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMARUDIN, S.Kom,MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Akuntansi & Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN


SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI
DAN PELAPORAN


KOMARUDIN, S.Kom, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB 1. KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, dan tepat waktu	100	Persen (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.150.897.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 240.160.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026

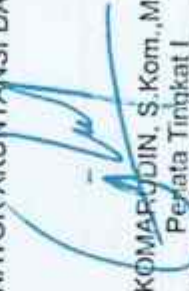
Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
PIL. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN


SISWO HANDOYO, SH., MM
 Pembina
 NIP. 19720228 199403 1 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPORAN


KOMARUDIN, S. Kom., MM
 Perata Tingkat I
 NIP. 19781105 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMARUDIN, S.Kom,MM
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN

KOMARUDIN, S.Kom, MM
Perata Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUBAG PERLENGKAPAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terdministrasikannya penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang lengkap, mutakhir, dan tertib	100	Persen (%)
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan handal	14	Persen (%)
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan	25	Persen (%)
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	unit
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	50	Persen (%)
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan	80	Persen (%)
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Bulan
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Bulan
3.	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	56	unit
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bulan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 10.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 75.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 350.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 339.560.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
7.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 90.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
8.	Pemeliharaan Mebel	Rp 25.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
9.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 92.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
Pit. KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

KOMARUDIN, S.Kom.,MM
Pada Tingkat I
NIP. 19781105 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNI KARJAWATI, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

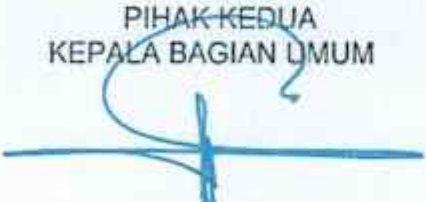
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM


Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN


JUNI KARJAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710610 199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBAG. TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum	43	Persen (%)
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perkantoran yang tertib dan handal Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Paket
3.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen
II	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai spesifikasi dan ketentuan	66,66	Persen (%)
1.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	5	Unit
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	50	Persen (%)
1.	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan
IV	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	33	Persen (%)
1.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4	Paket
V	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	50	Persen (%)
1.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	2	Laporan
2.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen
VI	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya dukungan peningkatan kapasitas DPRD yang efektif dan profesional	25	Persen
1.	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	1	Dokumen
2.	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 70.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 100.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
3.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 10.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
4.	Pengadaan Mebel	Rp 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 204.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
6.	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp 730.830.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
7.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 604.134.890,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
8.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp 15.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
9.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp 65.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
10.	Orientasi DPRD	Rp 7.500.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
11.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp 2.753.830.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

JUNI KARJAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710610 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIYORINI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

SETIYORINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700717 199403 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUBAG. RUMAH TANGGA**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
I	Administrasi Kepogawayaan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawayaan perangkat daerah secara tertib	100	Persen
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9	Orang
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi umum	43	Persen
1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	perkantoran yang tertib dan handal Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan
2.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar layanan	20	Persen
1.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit
IV	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD secara tertib dan terdokumentasi	33,33	Persen
1.	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan
V	Facilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya pelaksanaan tugas DPRD yang terfasilitasi secara optimal	20	Persen
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62	Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 50.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 230.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 150.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 80.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
5.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 160.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
6.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 900.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026
7.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 15.450.000.000,00	APBD Kab. Pekalongan TA 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19690118 198903 1 007

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

SETIYORINI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19700717 199403 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI KUSMIYATI, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Verifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SISWO HANDOYO, SH.,MM
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
PLT. KEPALA BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN


SISWO HANDOYO, SH.,MM
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI


ENI KUSMIYATI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19770124 200901 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI**

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
III	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersalurkannya hak keuangan dan kesejahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	33,33	%
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	14	Bulan

No. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

Anggaran

Rp. 10.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 33.830.147.000,00

Keterangan

APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026

PIHAK KEDUA
PII. KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN



SISWO HANDOYO, SE, M.M.
Pembina
NIP. 19720228 199403 1 001

Kajen, Januari 2026
PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
SUB KOORDINATOR VERIFIKASI



ENI KUSMIYATI, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19770124 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitas Pengawasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
FASILITASI PENGAWASAN

DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19870520 201101 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN

No. 1	Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4	Satuan 5
I	Layanan Keuangan dan Kesojahteraan DPRD	Tersalurkannya hak keuangan dan kesojahteraan DPRD tepat waktu dan sesuai ketentuan	33	Persn (%)
1.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	45	Orang
II	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	100	Persn (%)
1.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	12	Dokumen
2.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Dokumen
III	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersorapnya aspirasi masyarakat secara efektif dan terintegrasi	25	Persn (%)
1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	12	Laporan
IV	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terselenggaranya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD secara tertib dan efektif	100	Persn (%)
1.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	Dokumen
2.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	4	Laporan

No. Sub Kegiatan

1. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
2. Pengawasan Penggunaan Anggaran
3. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
5. Penyusunan Kode Etik DPRD
6. Pengawasan Kode Etik DPRD

Anggaran

Rp 242.277.000,00
Rp 30.000.000,00
Rp 35.000.000,00
Rp 200.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 21.500.000,00

Keterangan

APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN


WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
/ SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN


DEWI EKO SETIYOWATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19870520 201101 2 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI ALROFIAH, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WINARSO, SE
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN
FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN

WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA/
SUB KOORDINATOR
FASILITASI PENGANGGARAN

SITI ALROFIAH, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19690531 199710 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran	100	Person
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPA	2	Dokumen
2	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	2	Dokumen
3	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	Dokumen
4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen

No. Sub Kegiatan

1. Pembahasan KUA dan PPAS
2. Pembahasan APBD
3. Pembahasan Laporan Semesteran
4. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Anggaran

Rp 31.787.560,00
Rp 45.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Rp 30.000.000,00

Keterangan

APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026
APBD Kab. Pekalongan TA 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN



WINARSO, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19740517 199803 1 002

Kajen, Januari 2026

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN



SITI ALROFIAH, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19690531 199710 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	94

Kajen, Januari 2024
Mengetahui,
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pekalongan


 Wahyu Kuncoro, ST, MT
 NIP. 19700418 199703 1 004

TABEL 2.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN PEKALONGAN

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah		100	38,586,421,900			39,671,500,000			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		100	20,000,000		100	25,000,000			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhi nya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	10,000,000		4 dokumen	12,500,000	X		
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	10,000,000		12 laporan	12,500,000	X		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD		100	5,158,980,000		100	5,295,960,000			
1.2.1	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	4,883,020,000		12 bulan	5,000,000,000	X		
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhi nya koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	275,960,000		12 dokumen	295,960,000	X		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		100	100,000,000		100	125,000,000					
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertakutnya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-					
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertakutnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	100,000,000		20 orang	125,000,000	X				
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD		100	697,500,000		100	767,000,000					
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	20,000,000		1 paket	22,000,000	X				
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	70,000,000		1 paket	85,000,000	X				
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah tangga	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	155,000,000		2 paket	175,000,000	X				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Tersedianya barang cetakan dan penggantian kantor	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 paket	107,500,000		2 paket	105,000,000	X				
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan bagi tamu	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	200,000,000		12 laporan	220,000,000	X				
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	150,000,000		12 laporan	160,000,000	X				
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya arsip dinamis pada Sekretariat DPRD	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-	-				
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	475,000,000		100	600,000,000					
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 unit	200,000,000		4 unit	250,000,000	X				
1.5.2	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 unit	50,000,000		5 unit	60,000,000	X				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.3.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	150,000,000		10 unit	160,000,000	X					
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	50,000,000		1 unit	100,000,000	X					
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	25,000,000		1 unit	30,000,000	X					
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD		100	908,830,000		100	960,000,000						
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	250,000,000		12 laporan	260,000,000	X					
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenaillnya tempo penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	658,830,000		12 laporan	700,000,000	X					
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	625,500,000		100	691,000,000						
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 unit	240,000,000		6 unit	250,000,000	X					

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 unit	125,000,000		11 unit	135,000,000	X				
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Terperuhnya pemeliharaan mebel	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 unit	10,500,000	-	10 unit	11,000,000	X				
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terperuhnya pemeliharaan peralatan mesin kantor	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	100,000,000	-	15 unit	120,000,000	X				
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terperuhnya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	150,000,000	-	1 unit	175,000,000	X				
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100	29,701,654,000		100	30,153,540,000					
1.8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	28,473,540,000		12 bulan	28,873,540,000	X				
1.8.2	Penyediaan Pakuan dinas dan atribut DPRD	Tersedianya pakaian PSI, PSR, PSK, PDH dan pakuan adat daerah	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	800,000,000		4 paket	850,000,000	X				
1.8.3	Pelaksanaan Medical check up DPRD	Terlaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Pekalongan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	428,114,000		45 orang	430,000,000	X				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
1.9	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD		100	898,957,900		100	1,054,000,000					
1.9.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksunanya fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 laporan	3,500,000		6 laporan	4,000,000	X				
1.9.2	Fasilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksunanya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219 laporan	695,457,900		219 laporan	800,000,000	X				
1.9.3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 paket	200,000,000		12 paket	250,000,000	X				
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP		100	26,343,583,000		100	31,465,808,000					
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD		100	305,000,000		100	525,500,000					
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Tersusunnya dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	5,000,000		4 dokumen	5,500,000	X				
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	100,000,000		2 Dokumen	120,000,000	X				
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terperuhnya dokumen Naskah Akademik dan/Perda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	200,000,000		2 dokumen	400,000,000	X				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-	-	0	-	-		
2.2	Pembahasan Kebijakan anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran		100	283,668,000		100	347,583,000			
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	59,150,000		2 dokumen	65,065,000	X		
2.2.2	Pembahasan APBD	Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	128,618,000		2 dokumen	178,618,000	X		
2.2.3	Pembahasan laporan semester	Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	26,250,000		2 dokumen	28,250,000	X		
2.2.4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	69,650,000		1 dokumen	75,650,000	X		
2.3	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan		100	201,725,000		100	220,725,000			
2.3.1	Pengawasan penggunaan anggaran	Terpenuhiya dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 dokumen	150,625,000		8 dokumen	165,625,000	X		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting	Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3.2	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terpenyihnya dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	51,100,000		1 dokumen	55,100,000	X		
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase peningkatan kapasitas DPRD		100	3,410,000,000		100	3,832,500,000			
2.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-			
2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEK/ pendalaman tugas DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	2,550,000,000		6 dokumen	2,850,000,000	X		
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 orang	250,000,000		6 orang	270,000,000	X		
2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terpenyihnya dokumen hasil kajian analisis LKPJ dan anggaran	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	10,000,000		2 dokumen	12,500,000	X		
2.4.5	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	600,000,000		12 dokumen	700,000,000	X		
2.4.6	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenyihnya dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub-kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prkiraan Maja Rencana Tahun 2026			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi		100	2,500,000,000		100	3,500,000,000				
2.5.1	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	2,500,000,000		3 dokumen	3,500,000,000	X			
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		100	8,500,000		100	11,500,000				
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Terpenuhnya dokumen kode etik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	3,500,000		1 dokumen	4,000,000	X			
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terpenuhnya laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	5,000,000		2 laporan	7,500,000	X			
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah		100	5,000,000		100	6,000,000				
2.7.1	fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Terpenuhnya dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	5,000,000		2 dokumen	6,000,000	X			
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		100	19,629,690,000		100	23,022,000,000				
2.8.1	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 dokumen	19,609,690,000		128 dokumen	23,000,000,000	X			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2026		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2.8.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Tersebutnya laporan fraksi/Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	5,000,000		1 laporan	5,500,000	X		
2.8.3	Facilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	Tersebutnya dokumen hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	5,000,000		4 dokumen	5,500,000	X		
2.8.4	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersebutnya dokumen hasil Facilitasi tugas pimpinan DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	5,000,000		12 Dokumen	5,500,000	X		
2.8.5	Facilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus	Tersebutnya dokumen Facilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	5,000,000		4 Dokumen	5,500,000	X		
	TOTAL				64,930,000,900			71,137,308,000			

Kajen, 24 Juli 2024

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

YUDHI HINAWAN, ST, MS, MT
NIP. 19730511 200502 1 003



KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	TARGET KINERJA TAHUN 2025						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																12=11.7
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																5,187,017,020
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																(13,090,000)
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																(6,500,000)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																(6,590,000)
1.2.1	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN																70,384,500
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																102,877,000
																	(32,512,500)

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7
1.3	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawain Sekretariat DPRD	100	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		100		25,000,000	(75,000,000)
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Tertelusurnya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tertelusurnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20 orang	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		20 orang	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	(75,000,000)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD	100		697,500,000		100		735,916,250	38,416,250
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000		1 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	(6,000,000)
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000		1 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	2 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000		2 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,000,000	175,000,000
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	2 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,500,000		2 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,500,000	10,000,000
1.4.5	Facilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya fasilitas kunjungan bagi tamu	12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,316,250	(67,683,750)

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD		Tersedianya ruang koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,100,000	(72,900,000)
1.4.7	Penyalaksanaan Anjak Dinas pada SKPD		Tersedianya anjak dinas pada Sekretariat DPRD	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD	100		475,000,000		100		3,557,757,400	3,082,757,400
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		6 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,034,692,500	1,834,692,500
1.5.2	Pengadaan Mebel		Tersedianya mebel	5 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		5 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,536,700	75,536,700
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	10 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		10 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	825,128,200	675,128,200
1.5.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000		1 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	(50,000,000)
1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000		1 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	572,400,000	547,400,000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD	100		908,830,000		100		1,064,971,600	156,141,600
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000		12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	334,141,600	84,141,600

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhnya tenaga penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	658,830,000		12 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	730,830,000	72,000,000
1.7	Pembelajaran Baring Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian pembelajaran barang milik daerah penunjang urusan DPRD	100		625,500,000		100		1,930,370,000	1,304,870,000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246,000,000		6 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,000,000	(72,000,000)
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000		11 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,500,000	(37,500,000)
1.7.3	Pemeliharaan Mebel		Terpenuhnya pemeliharaan mebel	10 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,500,000		10 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	4,500,000
1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhnya pemeliharaan peralatan mesin kantor	15 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		15 unit		70,000,000	(30,000,000)
1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhnya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000		1 unit	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,589,870,000	1,439,870,000
1.8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100		29,701,654,000		100		30,598,771,920	897,117,920
					48						

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7
1.8.1	Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD		Terbayarnya gaji dan Tunjangan anggota DPRD	12 bulan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,473,540,000		12 bulan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,630,147,000	1,156,607,000
1.8.2	Penyediaan Pakan dinas dan arribud DPRD		Tersedianya pakan PSI, PSR, PSI, PMH dan pakan adir daerah	4 Paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000,000		4 Paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	661,790,350	(138,209,650)
1.8.3	Pelaksanaan Medical check up DPRD		Tertaksananya medical check up bagi pimpinan dan anggota DPRD	45 orang	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	428,114,000		45 orang	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	306,834,330	(121,279,670)
1.9	Layanan Administrasi DPRD		Presentase layanan Administrasi bagi DPRD	100		898,957,900		100		634,397,250	(264,560,650)
1.9.1	Facilitasi Fraksi DPRD		Tertaksananya fasilitasi Fraksi DPRD	6 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan	3,500,000		6 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan	3,500,000	-
1.9.2	Facilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		Tertaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	219 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	695,457,900		219 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	630,897,250	(64,560,650)
1.9.3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000		12 paket	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	(200,000,000)
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Prosesnase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100		26,343,583,000		100		18,367,662,850	(7,475,920,150)
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	100		305,000,000		100		151,578,800	(153,421,200)
2.1.1	Penyusunan dan penibahan program pembentukan peraturan daerah		Tersedianya dokumen hasil penyusunan dan penibahan program pembentukan peraturan daerah	4 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		4 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,225,800	(1,776,200)
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan		Terselenggaranya kajian perundang-undangan yang diusun tepat waktu	2 Dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000		2 Dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	(85,000,000)

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Penelitian/Keterangan Naskah Akademik		Terpenuhiya dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200.000.000		2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	133.355.000	(66.645.000)
2.1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Terusunnya dokumen tata tertib DPRD	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-
2.2	Pembahasan Kebijakan anggaran		Prosentase peninjauan kebijakan anggaran	100		283.608.000		100		122.556.160	(161.111.840)
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS		Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.150.000		2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28.228.760	(30.921.240)
2.2.2	Pembahasan APBD		Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128.618.000		2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.920.320	(83.697.680)
2.2.3	Peninjauan laporan semester		Terpenuhiya dokumen hasil peninjauan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester	2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.250.000		2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.188.500	(4.061.500)
2.2.4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Terpenuhiya dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.650.000		1 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27.218.580	(42.431.420)
2.3	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100		201.725.000		100		119.294.400	(82.430.600)
2.3.1	Pengawasan penggunaan anggaran		Terpenuhiya dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	8 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.625.000		8 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.242.500	(70.382.500)
2.3.2	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		Terpenuhiya dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.100.000		1 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39.051.900	(12.048.100)
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100		3.410.000.000		100		3.316.797.810	(93.202.190)
2.4.1	Orientasi DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti orientasi DPRD	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	-
2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD		Tekunnya Anggota DPRD yang mengikuti BINTEN/pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.550.000.000		6 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.354.830.000	(215.170.000)

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-7
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	6 orang	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000		6 orang	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	731,123,450	481,123,450
2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD		Terperuhnya dokumen hasil kajian analisis LKPD dan anggaran	2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000		2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	(10,000,000)
2.4.5	Publikasi dan dokumentasi Dewan		Terbagainya honor tenaga ahli fraksi DPRD	12 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000		12 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242,576,860	(357,423,140)
2.4.6	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Terperuhnya dokumen Rencana Kerja DPRD	0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,267,500	8,267,500
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Anggaran		Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan insentif insasurakit	100		2,500,000,000		100		2,409,153,620	(470,846,380)
2.5.1	Pelaksanaan Reses		Terlaksananya kegiatan reses DPRD	3 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000,000		3 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,029,153,620	(470,846,380)
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100		8,500,000		100		29,624,100	21,124,100
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD		Terperuhnya dokumen kode etik	1 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000		1 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,413,500	(1,086,500)
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD		Terperuhnya laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		2 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,210,600	22,210,600
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan kerjasama daerah	100		5,000,000		100		3,340,240	(1,659,760)
2.7.1	Facilitasi, Verifikasi dan Koordinasi perserutuan kerja sama daerah		Terperuhnya dokumen rekomendasi hasil Facilitasi, Verifikasi dan koordinasi Perserutuan Kerjasama daerah	2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		2 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,340,240	(1,659,760)
2.8	Facilitasi Tugas DPRD		Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	100		19,629,690,000		100		13,095,317,720	(6,534,372,280)

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				SELISIH
			Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)	Indikator Kinerja Out put/Out Come	VOLUME	LOKASI	JUMLAH (Rp.)
2.8.1	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	4 Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	5	5 Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7	8	9	10 Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11
				128 dokumen		19,609,600,000		128 dokumen		13,084,720,000
										(6,524,970,000)
2.8.2	Persyusunan laporan kinerja DPRD		Terselenggaranya laporan triaksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD	1 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		1 laporan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,650,320
2.8.3	Facilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah		Terpenjalanya dokumen hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		4 dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,922,500
2.8.4	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Terpenjalanya dokumen hasil Facilitasi tugas pimpinan DPRD	12 Dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		12 Dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,345,000
2.8.5	Facilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus		Terpenjalanya dokumen hasil Facilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	4 Dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000		4 Dokumen	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,679,900
						64,930,004,900				82,661,101,770
										(2,278,903,130)

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2026

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	100
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,46

Kajen, Januari 2025

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



YUDHI HIMAWAN, S.T, M.Sc, MT
NIP.19790511 200502 1 003

TABEL 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN PEKALONGAN**

URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM

OPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. PEKALONGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian program penunjang urusan Pemerintahan daerah		100	59,324,948,000			100	41,988,500,000			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		100	20,000,000			100	30,000,000			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	10,000,000			4 dokumen	15,000,000	3		
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	10,000,000			4 Laporan	15,000,000	3		
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu		100	30,000,000			100	35,000,000			
1.2.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	15,000,000			2 dokumen	17,500,000			
1.2.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	15,000,000			12 Laporan	17,500,000			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakirnaan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD	100	5,236,857,000		100	5,300,000,000					
1.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 orang/bulan	4,985,897,000	44	orang/bulan	5,000,000,000	x			
1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Sekretariat DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	250,960,000	12	dokumen	300,000,000	x			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD		100	50,000,000			100	225,000,000			
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang disusun tepat waktu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0				0				
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9	50,000,000			9	225,000,000	x		
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD		100	654,000,000			100	922,500,000			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	14,000,000			1	15,000,000	x		
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	70,000,000			1	80,000,000	x		
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	230,000,000			2	240,000,000	x		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana			
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN	
				4									5
1	2	3											
1.5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Paket	100,000,000			2	Paket	125,000,000	x	
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Timu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan bagi timu	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	150,000,000			12	Laporan	175,000,000	x	
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Laporan	80,000,000			12	Laporan	275,000,000	x	
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	dokumen	10,000,000		-	2	dokumen	12,500,000	-	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100		20,275,000,000			100		1,775,000,000		
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0		-			0		200,000,000	x	
1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	unit	50,000,000			5	unit	75,000,000	x	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 unit	150,000,000	12 unit	400,000,000	x				
1.6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	20,000,000,000	1 unit	1,000,000,000	x				
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	75,000,000	3 unit	100,000,000	x				
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD		100	1,080,830,000	100	1,125,000,000					
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	375,000,000	x				
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	730,830,000	12 Laporan	750,000,000	x				
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD		100	675,000,000	100	1,085,000,000					

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Taget Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN	
				4	5							8
1	2	3				6	7					
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit	350,000,000		9 unit	375,000,000	x			
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 unit	90,000,000		17 unit	100,000,000	x			
1.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	25,000,000	-	15 unit	30,000,000	X			
1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 unit	110,000,000	-	25 unit	130,000,000	X			
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	100,000,000	-	2 unit	450,000,000	X			
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100	30,588,261,000		100	29,800,000,000				
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang/bulan	29,630,147,000		45 orang/bulan	28,600,000,000	x			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.9.2	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	650,000,000		4 Paket	750,000,000	8		
1.9.3	Pelaksanaan Medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 orang	308,114,000		45 orang	450,000,000	8		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pago Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pago Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
1.10	Layanan Administrasi DPRD	Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD		100	715,000,000			100	1,691,000,000			
1.10.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20,000,000			1 dokumen	21,000,000			
1.10.2	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	15,000,000			2 Laporan	20,000,000	x		
1.10.3	Facilitasi Rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	630,000,000			12 Laporan	950,000,000	x		
1.10.4	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD yang disediakan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	50,000,000			12 Paket	700,000,000	X		
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP		100	20,816,600,000			100	33,576,500,000			
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD		100	260,000,000			100	490,000,000			
2.1.1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	10,000,000			4 dokumen	15,000,000	x		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2.1.2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen kajian perundang-undangan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	100,000,000		2 dokumen	125,000,000	x				
2.1.3	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	150,000,000		4 dokumen	350,000,000	x				
2.1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen tata tertib DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-					
2.2	Pembahasan Kebijakan anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran		100	133,000,000		100	155,000,000					
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	33,000,000		2 dokumen	40,000,000	x				
2.2.2	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	45,000,000		2 dokumen	50,000,000	x				
2.2.3	Pembahasan laporan semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,000,000		1 dokumen	30,000,000	x				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.2.4	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	35,000,000	x				
2.3	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan		100		100	95,000,000					
2.3.1	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	30,000,000	12 dokumen	35,000,000	x				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3.2	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil/pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	51,100,000	1 dokumen	60,000,000	x			
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100	3,387,500,000		100	4,060,000,000				
2.4.1	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	3,500,000	-	1 dokumen	10,000,000			
2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	2,384,000,000	6 dokumen	3,000,000,000	x			
2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 orang	240,000,000	6 orang	260,000,000	x			
2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	15,000,000	x			
2.4.5	Publikasi dan dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	750,000,000	12 dokumen	775,000,000	x			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakirran Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.4.6	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terpenuhiya dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	-	-		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		100	2,325,000,000		100	3,230,000,000			
2.5.1	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan hasil kunjungan Kerja DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	200,000,000		12 Laporan	225,000,000			
2.5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	25,000,000		1 dokumen	30,000,000			
2.5.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	2,000,000,000		3 dokumen	2,700,000,000	x		
2.5.4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 orang	100,000,000		400 orang	275,000,000			
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		100	35,000,000		100	42,000,000			
2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	10,000,000		1 dokumen	12,000,000	x		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraa Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	30,000,000	x			
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah		100	10,000,000	100	12,000,000				
2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	12,000,000	x			
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD		100	14,585,000,000	100	25,492,500,000				
2.8.1	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 dokumen	14,500,000,000	75 dokumen	25,000,000,000	x			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Program/kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Sumber Dana		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	TARGET CAPAIAN KINERJA		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Kab	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.8.2	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,000,000		1 Laporan	12,500,000	x			
2.8.3	Facilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	25,000,000		12 dokumen	30,000,000	x			
2.8.4	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitas tugas pimpinan DPRD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	25,000,000		12 dokumen	275,000,000	x			
2.8.5	Facilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen hasil Fasilitas pelaksanaan tugas panitia khusus	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	25,000,000		4 dokumen	175,000,000	x			
	TOTAL				80,141,548,000			75,565,000,000				

Kajen, 31 Juli 2025

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

YUDHI HIMAWAN, ST, MS.c, MT
NIP. 19790511 200502 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2027

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	100
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,47

Kajen, Januari 2026
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

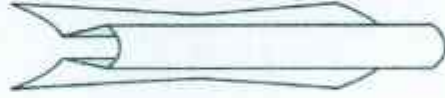

HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP
NIP.19791204 199810 1 001



MATRIK CAPAIAN KINERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

MATRIK REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029
RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD	% Capaian thd Target Akhir RPJMD
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tahun 2024									
1.	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	%	95	91	94	96	102	95	101
	Tahun 2025									
1.	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	%			100	85	85	100	85
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka			72.45	72.5	100	72.5	100

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

- Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator kinerja Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 85%. Capaian produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu terealisasi sebesar 85% artinya bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik jika dibandingkan dengan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena capaian produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan sudah baik, namun demikian masih ada Produk Hukum yang belum selesai pada tahun 2025 dan diteruskan pada Tahun 2026 dan sekarang masih dalam proses pembahasan, hal ini karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan produk hukum tersebut.

Dan untuk sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD teralisasi sebesar 72,50 artinya Tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pekalongan sudah baik.

Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 (dua) program, dan 17 (tujuh belas) kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dari program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 8 (delapan) kegiatan dari program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2025. Diharapkan seluruh kegiatan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- i. Layanan Administrasi DPRD

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi perkantoran, sehingga terciptanya pelayanan administrasi kepada anggota DPRD yang lebih optimal.

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Pembahasan Kerjasama Daerah
- h. Fasilitas Tugas DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan.

ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM RANGKA TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KINERJA			ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	%	100	85	85	65,947,529,614	63,848,534,785	96,82
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72.45	72.5	100			

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		99,59
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	100	Bagian Umum	Persentase ketercapaian kegiatan bagian umum	100
				Bagian Program dan Keuangan	Persentase ketercapaian kegiatan bagian program dan keuangan	100
				Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase ketercapaian kegiatan bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan	89
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersedia	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	100
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100
				Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah	100
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2025**

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	100
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	96
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian PSL, PSR, PSH, PDH dan peralatan adat daerah yang tersedia	100
				Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota yang melaksanakan medical check up	89
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan Administrasi bagi DPRD	100
				Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi Fraksi DPRD	100
				Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
				Bagian Persidangan dan perundang-undangan	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat Paripurna	100
				Bagian Fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Bagian Umum	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	100
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD	67
				Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	100
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang diselarenggarakan	0
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Penda inisiatif DPRD yang tersusun	100
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	100
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS yang tersusun	100
				Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	100
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD persemester	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	100
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	100
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	100
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	100
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah paket kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang terlaksana	100
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah laporan penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Uraian/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	100
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100
				Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan reses DPRD	100
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik yang tersusun	100
				Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	100
				Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	100
				Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Verifikasi dan koordinasi Persetujuan Kerjasama daerah	100
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD	100

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2025

SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NO	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100
					Perjalanan Dinas Luar pulau	100
					Perjalan Dinas Luar Provinsi	100
					Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 3 hari	100
					Perjalanan Dinas Dalam Provinsi 1 hari	100
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang terwujud	100
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100
				Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	100
				Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	100

Untuk capaian indikator kinerja sesuai dengan RKPD/RPJMD tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan per 31 Desember 2025 ada sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu:

1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang masih tercapai 96 % karena ada sub kegiatan yaitu Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD yang tidak tercapai, hal ini karena ada 4 orang anggota DPRD yang tidak melaksanakan *Medical Check Up*
2. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang masih tercapai 67% karena ada sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan tidak terlaksana, hal ini DPRD Kabupaten Pekalongan tidak melaksanakan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan, karena adanya efisiensi anggaran. Untuk Raperda karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyusunan Raperda.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 sebesar 85% dari target yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 100%, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 85%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar 91% dari target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 95,1%, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 96%, Jika dibandingkan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2024 dan tahun 2025 ada penurunan sebesar 11%, hal ini karena masih ada Produk Hukum yang belum selesai pada tahun 2025, diteruskan pada Tahun 2026 dan sekarang masih dalam proses pembahasan.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 yang terdapat dalam RPJMD 2025-2029, terealisasi sebesar 85% dari target yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 100 %, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja tercapai sebesar 85%.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025, sehingga bisa dilihat target dan realisasinya selama tahun 2025. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai target sebesar Rp. 43.901.411.034,- dan terealisasi sebesar 96,80% yaitu sebesar Rp.42.497.006.060,-, dan untuk Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai target sebesar Rp. 22.046.118.580,- dan terealisasi sebesar 96,85% yaitu sebesar Rp. 21.351.528.725,-, dengan demikian menunjukkan efisiensi anggaran sebesar **Rp.2.098.994.829,-**

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2025

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH						
	BELANJA OPERASI			65.947.529.614	63.848.534.785	2.098.994.829	96,82
	BELANJA MODAL			62.446.357.714	60.443.773.039	2.002.584.675	96,79
				3.501.171.900	3.404.761.746	96.410.154	97,25
		SEKRETARIAT DPRD					
		PROGRAM PENUNJANG					
		URUSAN PEMERINTAHAN					
		DAERAH					
		KABUPATEN/KOTA		43.901.411.034	42.497.006.060	1.404.404.974	96,80
			1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.910.000	5.337.200	1.572.800	77,24
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.529.223.300	4.867.942.283	661.281.017	88,04
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	46.000.000	4.000.000	92,00

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2025

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	820,916,250	794,706,427	26,209,823	96,81
			5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,707,757,400	3,591,836,256	115,931,144	96,87
			6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,057,471,600	954,026,814	103,444,786	90,22
			7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,995,370,000	1,832,822,476	162,547,524	91,85
			8 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29,429,365,234	29,137,874,504	291,490,730	99,01
			9 Layanan Administrasi DPRD	1,304,397,250	1,266,470,100	37,927,150	97,09
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		22,046,118,580	21,351,528,725	694,589,855	96,85
			10 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	151,578,800	127,503,000	24,075,800	84,12
			11 Pembahasan Kebijakan Anggaran	122,556,160	118,219,000	4,337,160	96,46
			12 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	281,116,800	226,449,000	54,667,800	80,55
			13 Peningkatan Kapasitas DPRD	3,735,797,810	3,297,307,158	438,490,652	88,26
			14 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,279,153,620	2,253,779,675	25,373,945	98,89
			15 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	12,054,600	11,500,800	553,800	95,41
			16 Pembahasan Kerjasama Daerah	3,340,240	3,327,600	12,640	99,62
			17 Fasilitasi Tugas DPRD	15,460,520,550	15,313,442,492	147,078,058	99,05
		Jumlah dan rata-rata %		65,947,529,614	63,848,534,785	2,098,994,829	96,82

5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yg telah dilakukan
Keberhasilan Kinerja DPRD Kabupaten Pekalongan salah satunya bisa dilihat dari keputusan-keputusan yang dihasilkan selama tahun 2025, hal ini disajikan dalam tabel berikut: dengan penjelasan sebagai berikut:

Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 9 (Sembilan) buah turun sebesar 33% dari tahun 2024 yang menyelesaikan 12 (Dua Belas) buah Peraturan Daerah, Keputusan DPRD sebanyak 19 (Sembilan Belas) buah turun sebesar 58% dari tahun 2024 yang menghasilkan 30 (Tiga Puluh) buah, Keputusan Pimpinan DPRD menghasilkan 7 (Tujuh) buah turun sebesar 14% dari tahun 2024 yang menghasilkan 8 (Delapan) buah. Keputusan Badan Anggaran menghasilkan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) naik sebesar 21% dari tahun 2024 yang menghasilkan 19 (Sembilan belas) buah, Keputusan Badan Musyawarah menghasilkan 44 (Empat Puluh Empat) naik sebesar 23% dari tahun 2024 yang menghasilkan sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) buah, Keputusan Panitia Khusus menghasilkan 44 (Empat puluh Empat) buah naik sebesar 20% dari tahun 2024 yang menghasilkan 35 (Tujuh) buah, Keputusan komisi I sebanyak 97 (Sembilan puluh Tujuh) buah naik sebesar 1% dari tahun 2024 yang menghasilkan sebesar 96 (Sembilan Puluh Enam) buah, Keputusan komisi II sebanyak 98 (Sembilan Puluh Delapan) buah naik sebesar 2% dari tahun 2024 yang menghasilkan sebesar 96 (Sembilan Puluh Enam) buah, Keputusan komisi III sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) buah turun sebesar 1% dari tahun 2024 yang menghasilkan sebanyak 98 (Sembilan Puluh Delapan) buah, Keputusan komisi IV sebanyak 99 (Sembilan Puluh Sembilan) turun sebesar 5% dari tahun 2024 yang menghasilkan sebanyak 104 (Seratus Empat) buah, Keputusan gabungan komisi I,II,III,IV sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) buah naik sebesar 41% dari tahun 2024 yang menghasilkan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) buah, Keputusan Badan Kehormatan sebanyak 9 (Sembilan) buah sama dengan tahun 2024 yang menghasilkan sebanyak 9 (Sembilan) buah, Keputusan Bapemperda sebanyak 14 (Empat Belas) buah turun sebesar 79% dari Tahun 2024 yang menghasilkan sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Regulasi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat sangat fluktuatif, hal ini menyebabkan kebutuhan monitoring menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala:

1. Mengantisipasi dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan agar bila terjadi perubahan bisa langsung menyesuaikan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

6. Foto/dokumen kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Dalam melakukan kegiatan untuk mendukung pencapaian program, maka kami lampirkan beberapa foto kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2025.

Kajen, Desember 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



HARYANTO NUGROHO, S.STP, M.AP
NIP.19791204 199810 1 001

Lampiran I
KINERJA DPRD Kabupaten Pekalongan TAHUN 2025

NO.	KINERJA DPRD	TAHUN			naik/turun (angka)	Prosentase %
		2024	2025	2025		
1	2	3	4	5	6	
1.	Peraturan daerah yang ditetapkan	12	9	-3		-33%
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30	19	-11		-58%
3.	Keputusan Pimpinan DPRD	8	7	-1		-14%
4.	Keputusan Badan Anggaran	19	24	5		21%
5.	Keputusan Badan Musyawarah	34	44	10		23%
6.	Keputusan Panitia Khusus	35	44	9		20%
7.	Keputusan Komisi I	96	97	1		1%
8.	Keputusan Komisi II	96	98	2		2%
9.	Keputusan Komisi III	98	97	-1		-1%
10.	Keputusan Komisi IV	104	99	-5		-5%
11.	Keputusan Gabungan Komisi I, II, III, IV	27	46	19		41%
12.	Keputusan Badan Kehormatan	9	9	0		0%
13.	Keputusan Bapemperda	25	14	-11		-79%

Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan



Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Mitra



Rapat Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Mitra



Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan



Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan



Rapat Kerja Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Mitra



Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Mitra



Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan



Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan



Rapat Kerja Badan Pembentuk Perda DPRD Kabupaten Pekalongan



Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Pekalongan



Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan



Rapat Kerja Pimpinan AKD



MATRIK CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	TARGET AKHIR PERENCANAAN	% CAPAIAN TERHADAP KINERJA PADA AKHIR PERENCANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			OPD penanggung jawab
										URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	1. Meningkatkan Kapabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3. Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi tepat waktu	4. 100	5. 100	6. 100	7. 100	8. 100	PROGRAM PENUNJANG URSULAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.	11.	12.	13.	14. SETWAN
2	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72.45	72.5	100	72.5	100	Bagian Umum		Persentase ketepatan kegiatan bagian umum	9.491.887.590	42.497.000.000	SETWAN
								Bagian Program dan Keuangan		Persentase ketercapaian kegiatan bagian program dan keuangan	34.118.823.444	35.231.149.912	SETWAN
								Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan		Persentase ketercapaian kegiatan bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan	291.000.000	227.224.000	SETWAN
										Persentase dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.910.000	6.337.200	SETWAN
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	SETWAN
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.410.000	1.837.200	SETWAN
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.320.223.300	4.887.942.383	SETWAN
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.285.807.000	4.653.872.513	SETWAN
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	243.326.300	214.069.770	SETWAN
										Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	60.000.000	46.000.000	SETWAN
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menghimpun	50.000.000	46.000.000	SETWAN
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	830.916.250	794.708.427	SETWAN
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan	14.000.000	10.841.000	SETWAN
										Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididatikan	70.000.000	66.812.126	SETWAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	TARGET AKHIR PERENCANAAN	% CAPAIAN TERHADAP KINERJA PADA AKHIR PERENCANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			OPD penanggung jawab
										URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1									10	11	12	13	14
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perawatannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	87.500.000	65.331.800	SETWAN
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15.000.000	14.064.000	SETWAN
									Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105.000.000	94.086.240	SETWAN
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung, Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1.569.970.000	1.455.755.970	SETWAN
									Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penelitian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	29.429.365.234	25.137.874.604	SETWAN
									Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan anggota DPRD	28.476.574.844	26.274.258.474	SETWAN
									Penyediaan Pakalan Dinas dan Ambul DPRD	Jumlah pakelan PSL, PSR, PSH, PDH dan inkasas adat daerah yang tersedia	661.790.390	636.381.530	
									Relaksasi Medical Check Up DPRD	Jumlah pinjutan dan anggota yang melaksanakan medical check up	291.000.000	227.224.500	SETWAN
									Layanan Administrasi DPRD	Penelitian layanan Administrasi haji DPRD	1.304.387.250	1.266.470.100	SETWAN
									Facilitas Fraksi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitas Fraksi DPRD	3.000.000	3.000.000	SETWAN
									Facilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1.300.897.250	1.263.410.100	SETWAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	TARGET AKHIR PERENCANAAN	% CAPAIAN TERHADAP KINERJA PADA AKHIR PERENCANAan	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			OPD penanggung jawab
										URAIAN	PAOU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
								PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					SETWAN
								Bagian Pendidikan dan penunjang-undangan		Pusat dan kelurahan pelelaksanaan rapat Paripolnya	22,045,110,500	21,351,528,725	
								Bagian Fasilitas penganggaran dan pengawasan		Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	3,172,453,600	2,077,337,475	SETWAN
								Bagian Umum		Persentase pelaksanaan penganggaran kapasitas DPRD yang terfasilitasi	688,912,160	897,163,640	SETWAN
										Persentase pelaksanaan penganggaran kapasitas DPRD yang terfasilitasi	18,293,752,830	17,877,027,402	SETWAN
									Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Proses dan keterbukaan peraturan daerah dan peraturan DPRD	151,578,800	127,603,000	SETWAN
									Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	3,223,800	2,456,000	SETWAN
									Penyediaan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian penunjang-undangan yang duslenggarakan	10,000,000	-	SETWAN
									Fasilitasi: Penyusunan Pelayanan/Kolaborasi Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Perda inisiatif DPRD yang terfasilitasi	133,365,000	125,045,000	SETWAN
									Pembahasan Kebijakan Anggaran	Proses dan pelaksanaan kebijakan anggaran	122,555,160	118,219,800	SETWAN
									Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS yang terfasilitasi	26,226,750	27,771,200	SETWAN
									Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	67,922,100	64,145,200	SETWAN
									Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD semester	3,240,300	3,240,000	SETWAN
									Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	23,165,300	23,112,800	SETWAN
									Pengawasan Penyusunan Pemerintahan	Proses dan pelaksanaan penganggaran Pemerintahan	281,116,800	238,449,000	SETWAN
									Pengawasan Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pengawasan pengurusan anggaran	246,942,500	194,464,000	SETWAN
									Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	32,174,300	31,995,000	SETWAN
									Peningkatan Kapasitas DPRD	Proses dan pelaksanaan kapasitas DPRD	3,735,797,810	3,297,307,158	SETWAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	TARGET AKHIR PERENCANAAN	% CAPAIAN TERHADAP KINERJA PADA AKHIR PERENCANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			OPD penanggung jawab
										URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.								9	10	11	12	13	14
									Pendataan Tugas DPRD	Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendataan tugas	2.753.030.000	2.598.000.810	SETWAN
									Publikasi dan Dokumentasi Daerah	Jumlah paket kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang terakumulasi	731.123.450	481.572.900	SETWAN
									Penyediaan Tenaga Ahli Tetap	Jumlah laporan penyediaan tenaga ahli tetap DPRD	242.576.950	235.985.448	SETWAN
									Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun	8.267.500	802.000	SETWAN
									Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	2.279.153.530	2.253.779.676	SETWAN
									Pelaksanaan Rencana	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan rencana DPRD	2.278.153.820	2.263.778.675	SETWAN
									Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	12.664.800	11.500.800	SETWAN
									Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	9.341.300	8.787.500	SETWAN
									Pengawasan Kode etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	2.713.300	2.713.300	SETWAN
									Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase kegiatan pelaksanaan pembahasan Kerjasama daerah	3.340.240	3.327.800	SETWAN
									Facilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Pemertujuan Kerjasama daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Facilitasi, Verifikasi dan koordinasi Kerjasama daerah	3.340.240	3.327.800	SETWAN
									Facilitasi Tugas DPRD	Persentase kegiatan fasilitasi tugas DPRD	18.460.820.580	18.313.442.482	SETWAN
									Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	15.445.922.830	15.308.960.592	SETWAN
										Revisi dan Diklat Ujar pular			
										Revisi dan Diklat Luar Provinsi			
										Revisi dan Diklat Dalam Provinsi 3 hari			
										Revisi dan Diklat Dalam Provinsi 1 hari			
									Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD yang tersusun	2.650.320	550.200	SETWAN
									Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.927.500	1.820.200	SETWAN
									Facilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Facilitasi tugas pimpinan DPRD	2.345.000	418.500	SETWAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET REALISASI TAHUN 2025	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025	TARGET AKHIR PERENCANAAN	% CAPAIAN TERHADAP KINERJA PADA AKHIR PERENCANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			CPD penanggung jawab
										URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Facilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah dokumen Fasilitas pelaksanaan tugas panitia khusus	2.670.000	1.893.000	SETWAN
SUB TOTAL											85.847.529.814	63.848.534.785	
Jumlah											85.947.529.814	63.848.534.785	



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2025**



KABUPATEN PEKALONGAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah :

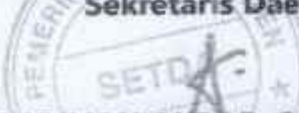
- a. Nama : YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT
- b. NIP : 19790511 200502 1 003
- c. Jabatan : Sekretaris DPRD

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp0
5	BELANJA DAERAH	Rp 68.557.515.900
	Total Surplus/(Defisit)	Rp (68.557.515.900)
6	PEMBIAYAAN	Rp0

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
NIP: 19750710 199903 1 008

Kajen, 02 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

CASMIDI, S.E., M.Si.
NIP: 19650407 199203 1 010



KABUPATEN PEKALONGAN

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 4

UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 4.02

SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Pengguna Anggaran :

a. Nama : YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT

b. NIP : 19790511 200502 1 003

c. Jabatan : Sekretaris DPRD

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Kajen, 02 Januari 2025

Disahkan oleh,



CASMIDI, S.E., M.Si.

NIP: 19650407 199203 1 010

Pengguna Anggaran



YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc, MT

NIP: 19790511 200502 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA- SKPD
PEMERINTAH KAB. PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Organisa : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD si				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00
5	1		BELANJA OPERASI	Rp67.337.726.000,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp34.766.044.000,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.571.682.000,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp1.219.789.900,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.061.969.900,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp57.820.000,00
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp100.000.000,00
			Jumlah Belanja	Rp68.557.515.900,00
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp68.557.515.900,00)
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
			Pembiayaan Neto	Rp0,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Kajen, Tanggal 02 Januari 2025 SEKRETARIS DPRD  YUDHI HIMAWAN, ST, M.Sc. MT NIP. 197905112005021003 Mengesahkan, PPKD  CASMIDI, S.E., M.Si. NIP. 198504071992031010
Januari	Rp0,00	Januari	Rp8.309.942.552,00	
Februari	Rp0,00	Februari	Rp7.513.904.520,00	
Maret	Rp0,00	Maret	Rp6.571.601.325,00	
April	Rp0,00	April	Rp6.975.624.344,00	
Mei	Rp0,00	Mei	Rp7.003.584.435,00	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp5.988.732.959,00	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp5.391.419.864,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp4.379.545.622,00	
September	Rp0,00	September	Rp5.142.894.223,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp4.557.570.095,00	
November	Rp0,00	November	Rp3.415.315.031,00	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp3.307.380.910,00	
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp68.557.515.900,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	TRISNO SUHARSANTO, S.E., M.Si.	197307101998031007	KEPALA BAPPERIDA	
2.	EKA IMAN PRABAWA, SH, M.Eng	197112251998031009	KABAG. ADM. PEMBANGUNAN SETDA	
3.	HASTO ARIBOWO, S.E, M.A	197804012005021004	KABID. AP BPKD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPA-BELANJA SKPD				
KAB. PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Unsur	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								Tahun				Jumlah		
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp67.337.726.000,00	Rp1.219.789.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.557.515.900,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				Rp67.337.726.000,00	Rp1.219.789.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.557.515.900,00	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp67.337.726.000,00	Rp1.219.789.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.557.515.900,00	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp40.864.723.000,00	Rp1.119.789.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.004.512.900,00	
									Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Pekalongan, Kaji, Tanjungsi		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Pekalongan, Kaji, Tanjungsi		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp5.261.857.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.261.857.000,00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Pekalongan, Kaji, Tanjungsi		Rp4.985.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.985.897.000,00	

Jumlah													
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun				T+1	
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer
4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntabilitas SKPD	Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungan		Rp275.960.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp275.960.000.00	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Rp50.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp50.000.000.00	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungan		Rp50.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp50.000.000.00	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp668.500.000.00	Rp8.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp676.500.000.00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungan		Rp14.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14.000.000.00	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pekalongan, Kajen, Kajen		Rp70.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp70.000.000.00	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungan		Rp180.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp180.000.000.00	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungan		Rp104.500.000.00	Rp8.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp112.500.000.00	
4	02	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungan		Rp150.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp150.000.000.00	

Jumlah													
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun				T-1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
4	02	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp523.275.000,00	Rp1.111.769.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.635.064.900,00	
4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp6.685.000,00	Rp103.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.000.000,00	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp0,00	Rp125.536.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.536.700,00	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp0,00	Rp625.128.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.128.200,00	
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp514.580.000,00	Rp57.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.400.000,00	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.040.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.830.000,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00	
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp730.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp730.830.000,00	

Jumlah													
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Kab. Tanjungari						
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.521.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.521.500.000,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungari	Rp166.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.000.000,00	
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungari	Rp87.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.500.000,00	
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungari	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungari	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	
4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungari	Rp1.181.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.181.000.000,00	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Rp30.806.251.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.806.251.000,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungari	Rp29.750.147.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.750.147.000,00	

Jumlah														
Usulan	Bidang Usulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun				T+1		
								T-	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Paksiat Dinas dan Akibat DPRD	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp428.114.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp428.114.000,00	
4	02	01	2.16		Layanan Administrai DPRD				Rp903.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp903.500.000,00	
4	02	01	2.16	0002	Facilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
4	02	01	2.16	0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000.000,00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Rp28.453.003.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.553.003.000,00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Rp188.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.500.000,00	
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
4	02	02	2.01	0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari			Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	

Jumlah								Tahun					T=1	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T=1	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Kab. Tanjungsari	Rp133.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.000.000,00		
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.000.000,00		
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00		
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00		
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Rp201.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.725.000,00		
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	Rp150.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.625.000,00		
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah		Kab. Pekalongan, Kajen, Tanjungsari	Rp51.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.100.000,00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			Rp3.896.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.896.600.000,00		

Jumlah													
Urutan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun					
								T-1				Jumlah	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp2.884.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 2.884.000.000,00	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp752.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp752.600.000,00	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Rp1.923.678.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.023.678.000,00	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp1.923.678.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.023.678.000,00	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD		Kab. Pekalongan, Kajan, Tanjung Sari	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD		Kab. Pekalongan	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	

Jumlah													
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun				Jumlah	
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer
							Kab. Tanjungpuri						
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
4	02	02	2.07	0001	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persejuaian Kerja Sama Daerah		Kab. Pekanbaru, Kajen, Tanjungpuri		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
4	02	02	2.08		Facilitasi Tugas DPRD				Rp20.119.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.119.000.000,00
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Kab. Pekanbaru, Kajen, Tanjungpuri		Rp20.105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.105.000.000,00
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Kab. Pekanbaru, Kajen, Tanjungpuri		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
4	02	02	2.08	0003	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Kab. Pekanbaru, Kajen, Tanjungpuri		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
4	02	02	2.08	0004	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Kab. Pekanbaru, Kajen, Tanjungpuri		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00
4	02	02	2.08	0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Kab. Pekanbaru, Kajen, Tanjungpuri		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp8.308.942.552,00
Februari	Rp7.513.904.520,00
Maret	Rp6.571.601.325,00
April	Rp6.875.624.344,00
Mei	Rp7.003.584.435,00
Juni	Rp5.989.732.859,00
Juli	Rp5.381.419.884,00
Agustus	Rp4.379.545.622,00
September	Rp5.142.804.223,00
Oktober	Rp4.557.570.095,00
November	Rp3.416.315.031,00
Desember	Rp3.307.380.910,00
Jumlah	Rp58.557.515.900,00

Kajem, Tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD



YUBEN HIMAWAN, ST, M.Si, MT
NIP. 197905112005021003

Mengesahkan,
PPKD



CASMIJI, S.E., M.Si
NIP. 196504071992031010

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	TRIENO SUHARSANTO, S.E., M.Si	197907101980031007	KEPALA BAPPERIDA	
2.	EKA IMAN PRABAWA, SH., M.Eng	197112251980031009	KABAG. ADM. PEMBANGUNAN SETDA	
3.	HASTO ARIBOWO, S.E., M.A	197504012005021004	KABID. AP BPKD	

*) Sesuai periodisasi BPO



DOKUMEN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH	Rp. 67.337.726.000	Rp. 62.147.672.714	(Rp. 5.190.053.286)	7.7 %
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 34.766.044.000	Rp. 33.562.471.844	(Rp. 1.203.572.156)	3.46 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 32.571.682.000	Rp. 29.585.200.870	(Rp. 3.986.481.130)	12.23 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.219.789.900	Rp. 3.799.056.900	Rp. 2.590.067.000	211.51 %
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 1.061.969.900	Rp. 3.491.536.900	Rp. 2.429.567.000	228.77 %
5 2 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 57.620.000	Rp. 108.320.000	Rp. 50.500.000	87.34 %
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100 %
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja	Rp. 68.557.515.900	Rp. 65.947.829.614	(Rp. 2.609.686.286)	3.8 %
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 68.557.515.900)	(Rp. 65.947.829.614)	Rp. 2.609.686.286	3.80 %

Kab. Pekalongan, 16 Juli 2025
Sekretaris DPRD

YUDHI HIRAWAN, ST, M.Sc. MT
NIP. 197905112005021003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

РЕКАПИТУЛАЦИ
ПКА-ВЕЛАНЈА
БКУД

© 2025 by the author. Published by Elsevier Inc.

Quadrat	4 32 0 00 0 00 0 000 Sekundat OPPO
---------	------------------------------------

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Journal of Education
--

[illegible]

